

**PENGARUH PROFITABILITAS DAN *LEVERAGE* TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PENGUNGKAPAN *CORPORATE*
SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi
yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016)

SKRIPSI



Oleh

**NUR AMALIA SARI
NIM : 14510057**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**PENGARUH PROFITABILITAS DAN *LEVERAGE* TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PENGUNGKAPAN *CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY* SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi
yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016)**

SKRIPSI

Diusulkan untuk penelitian Skripsi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

**NUR AMALIA SARI
NIM : 14510057**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH PROFITABILITAS DAN *LEVERAGE*
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI
(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi
yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016)**

Oleh:

NUR AMALIA SARI
NIM:14510057

Telah disetujui pada tanggal 22 Februari 2018

Dosen Pembimbing,



Hj. Mardiana, SE., MM.
NIDT. 19740519 20160801 2 045

Mengetahui :
Ketua Jurusan,



Drs. Agus Suctpto, MM.
NIP. 196708162003121001

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH PROFITABILITAS DAN *LEVERAGE* TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PENGUNGKAPAN *CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY* SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi
Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar
di BEI Tahun 2014-2016)**

SKRIPSI

Oleh :

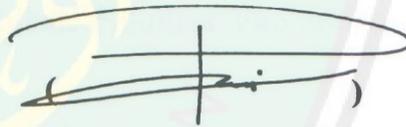
**NUR AMALIA SARI
NIM: 14510057**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (SM)
Pada Tanggal 21 Maret 2018

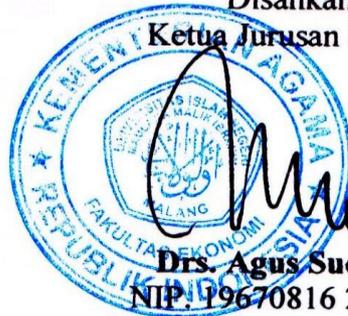
Susunan Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua
Puji Endah P, SE., MM
NIP. 198710002 201503 2 004
2. Sekretaris/Pembimbing
Hj. Mardiana, SE., MM
NIDT. 19740519 20160801 2 045
3. Penguji Utama
Dr. Basir S, SE., MM
NIDT. 19870825 20160801 1 044



Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan Manajemen,



Dr. Agus Sucipto, MM. 9
NIP. 19670816 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Amalia Sari

NIM : 14510057

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2016)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sederhana dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 21 Maret 2018

Hormat saya,



Nur Amalia Sari

NIM: 1451005

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap rasa syukur kepada Allah SWT ku persembahkan karya sederhana ini teruntuk kedua orangtuaku



MOTTO

Your attitude determines your direction

Stop over-thinking things and just do. Hidup tanpa GPS lebih seru



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak dengan CSR sebagai Variabel Pemoderasi (studi empiris pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016)” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang dengan ajaran-ajarannya kita dapat menghadapi kehidupan yang semakin mengglobal ini dengan terbekali iman Islam.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, Ucapan terima kasih penulis dihaturkan kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Drs. Agus Sucipto, MM. selaku Ketua Jurusan Manajemen.
4. Bapak H. Misbahul Munir, Lc, M.EI selaku Wali Dosen.
5. Ibu Hj. Mardiana., SE. MM. selaku Dosen Pembimbing.
6. Para Dosen Fakultas Ekonomi yang telah mengajarkan berbagi ilmu pengetahuan serta memberikan nasehat-nasehat kepada penulis selama studi di Universitas ini, beserta seluruh staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua Orang Tuaku Bapak Asikin dan Ibu Siti Nursari yang selalu mendoakan dan mendukungku.

8. Saudara laki-lakiku Irfan Nurardiansyah dan saudara perempuanku Dewi Perceka Sari, teman terdekatku di mabna ABA 27 dan kos pak umar, terima kasih atas motivasi, dukungan dan doanya.

9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen angkatan 2014 yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan dan sumbangsih pemikiran dalam memperlancar penulisan skripsi ini.

10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu-satu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih atas segala motivasi dan dukungannya, serta berdo'a semoga Allah SWT melipat gandakan pahala kebaikan kalian semua. Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mengalami kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Malang, 10 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	12
2.2. Kajian Teoritis	
2.2.1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	17
2.2.2. <i>Pecking Order Theory</i>	17
2.2.3. Teori Akuntansi Positif	18
2.2.4. <i>Trade Off Theory</i>	18
2.2.5. <i>Slack Resource Theory</i>	19
2.2.6. <i>Stakeholder Theory</i>	20
2.2.7. <i>Legitimacy Theory</i>	20
2.2.8. Pajak	
2.2.8.1. Definisi Pajak	21
2.2.8.2. Manajemen Pajak	21
2.2.8.3. Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	21
2.2.8.4. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	22
2.2.8.5. Kajian Islam tentang Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	23
2.2.9. <i>Return On Asset (ROA)</i>	
2.2.9.1. Pengertian <i>Return On Asset (ROA)</i>	25
2.2.9.2. Kajian Islam Tentang ROA	26
2.2.10. <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	
2.2.10.1. Pengertian <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	27
2.2.10.2. Kajian Islam tentang DER	28
2.2.11. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	
2.2.11.1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	29

2.2.11.2. Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i>	30
2.2.11.3. Prinsip-prinsip <i>CSR</i>	30
2.2.11.4. Pengungkapan <i>CSR</i>	31
2.2.11.5. Kajian Islam tentang <i>CSR</i>	32
2.3. Kerangka Konseptual	35
2.4. Hipotesis Penelitian	
2.4.1. Hubungan Profitabilitas dengan <i>Tax Avoidance</i>	36
2.4.2. Hubungan <i>Leverage</i> dengan <i>Tax Avoidance</i>	37
2.4.3. Hubungan Profitabilitas dan <i>Tax Avoidance</i> dengan <i>CSR</i> sebagai variabel pemoderasi	37
2.4.4. Hubungan <i>Leverage</i> dan <i>Tax Avoidance</i> dengan <i>CSR</i> sebagai variabel pemoderasi	38
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
3.2. Lokasi Penelitian	40
3.3. Populasi dan Sampel	40
3.4. Teknik Pengambilan Sampel	41
3.5. Data dan Jenis Data	41
3.6. Teknik Pengumpulan Data	41
3.7. Definisi Operasional Variabel	
3.7.1. Variabel Dependen	42
3.7.2. Variabel Independen	43
3.7.3. Variabel Moderasi	44
3.8. Metode Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
4.1.2. Hasil Analisis Deskriptif	52
4.1.3. Hasil Analisis Model PLS	
4.1.3.1. Diagram jalur (<i>diagram path</i>) PLS	53
4.1.3.2. Konversi diagram jalur ke sistem persamaan	54
4.1.3.3. Evaluasi kriteria <i>goodness of fit</i>	57
4.1.4. Hasil Pengujian Hipotesis	60
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	
4.2.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	62
4.2.2. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	67
4.2.3. Pengaruh <i>CSR</i> dalam Memperkuat Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	70
4.2.4. Pengaruh <i>CSR</i> dalam Memperkuat <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i>	74
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	79
5.2. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2014-2016	2
Tabel 1.2. Kasus Penghindaran Pajak Perusahaan Global	6
Tabel 1.3. Pertumbuhan Sektor Industri Barang Konsumsi Tahun 2013-2015 ...	8
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2.2. Perbedaan dan Persamaan Penelitian	17
Tabel 4.1. Kriteria Penarikan Sampel	48
Tabel 4.2. Daftar Sampel Perusahaan	49
Tabel 4.3. Pofil Perusahaan	50
Tabel 4.4. Statistik Deskriptif	52
Tabel 4.5. Uji Validitas Konvergen dengan <i>Loading Factor</i>	57
Tabel 4.6. Uji Validitas Diskriminan dengan AVE	58
Tabel 4.7. Uji Reliabilitas dengan <i>Composite Reliability</i> dan <i>Crobach Alpha</i>	59
Tabel 4.8. Hasil Evaluasi Model Struktural dengan R Square	59
Tabel 4.9. Pengujian Hipotesis	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual	35
Gambar 4.1. Hasil Output PLS <i>Algorithm</i>	53



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Data ROA, DER, *TAX AVOIDANCE*, DAN CSR

LAMPIRAN 2 Data ROA

LAMPIRAN 3 Data DER

LAMPIRAN 4 Data *Tax Avoidance*

LAMPIRAN 5 Data CSR

LAMPIRAN 6 Hasil Perhitungan PLS

LAMPIRAN 7 Indikator Pengungkapan CSR Berdasarkan GRI-G4



ABSTRAK

Sari, Nur Amalia. 2018, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak dengan CSR sebagai Variabel Pemoderasi (studi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016).

Pembimbing : Hj. Mardiana., SE. MM.

Kata Kunci : *Return on Assets, Debt to Equity Ratio, Effective Tax Rates, Corporate Social Responsibility Disclosure Index*

Penghindaran pajak adalah strategi dari manajemen pajak dalam suatu perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak atau bisa kita sebut mengurangi beban pembayaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh ROA dan DER terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi dengan *Corporate Social Responsibility*.

Data yang digunakan berasal dari laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasi periode 2014 hingga 2016 yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampelnya adalah purposive sampling dengan total 39 sampel data perusahaan di industri sektor barang konsumsi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik dengan menggunakan aplikasi *smartPLS*.

Hasil penelitian menunjukkan R^2 sebesar 57%, yang artinya variabel penghindaran pajak ini mampu dijelaskan oleh variabel ROA, DER, dan CSR sebesar 57%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel ROA terhadap penghindaran pajak. Namun hasil itu berbanding terbalik dengan pengaruh DER terhadap penghindaran pajak yang berpengaruh tetapi tidak signifikan. Selain itu, variabel pemoderasi yang digunakan penulis yaitu CSR, dapat memperkuat pengaruh antara DER terhadap penghindaran pajak, tetapi memperlemah pengaruh antara ROA terhadap penghindaran pajak.

ABSTRACT

Sari, Nur Amalia. 2018, *THESIS*. Title: "*The Effect of Profitability and Leverage on Tax Avoidance with CSR as Moderate Variables (study on consumer goods industry sector listed on BEI 2014-2016)*".

Supervisor : Hj. Mardiana., SE. MM.

Keywords : *Return on Assets, Debt to Equity Ratio, Effective Tax Rates, Corporate Social Responsibility Disclosure Index*

Tax Avoidance is a strategy of tax management within a company which aims to maximize income after tax or simply stated as the tax burden lessen. The purpose of this study is to determine whether there is influence of ROA and DER against tax avoidance moderated with Corporate Social Responsibility.

The data used are derived from annual reports and consolidated financial statements for the period 2014 to 2016 that have been listed on the Indonesia Stock Exchange. The sampling technique is purposive sampling with total 39 samples of company data in consumer goods industry. Data analysis method used is statistical analysis method by using smartPLS application.

The results showed R^2 of 57%, which means the variable tax avoidance is able to be explained by the variable ROA, DER, and CSR of 57%. While the rest is influenced by other variables. The result of hypothesis test shows that there is significant influence between ROA variable to tax avoidance. However, the result is inversely proportional to the effect of DER on tax evasion which is not really significant. Furthermore, the moderating variables used by the authors of CSR, can strengthen the influence between DER on tax avoidance, but weaken the influence between ROA on tax avoidance.

الملخص البحث

سارى نور أمليا. 2018. البحث الجامعى. العنوان. تأثير *Profitabilitas* و *Leverage* على التجنب الضريبية مع الرفاه الاجتماعى للشركات كما المتغير الاعتدال (دراسة على الشركات فى قطاع الصناعة السلعية الاستهلاكية المدرجة فى برصة اندونيسية للسنة 2014-2016)

المشرفة: مريانا، الحجة الماجستير

الكلمات الرئيسية: *Return On Assets, Debt On Equity Ratio, Tax Rates, Corporate Social Responsibility, Disclosure Index*

التجنب الضريبية هو استراتيجية من حكم الخرج فى الشركة التى تهدف إلى تعظيم الارباح بعد الخرج او يستطيع ان نسنى لتقليل المصاريف على دفع الخرج، والغرض هذا البحث لمعرفة وجود اوجاب اثر ROA و DER على تجنب الخرج الذى يعدل (*corporate social responsibility*) (والرفاه الاجتماعى للشركات)

البيانات التى تستخدمها هي من محاسبة سنوية ومحاسبة مالية توحيد على مدة 2014-2016 المدرجة فى برصة الاندونسية. الاسلوب فى جمع البيانات هو الهادفة مع مجموعة 39 عينات من البيانات الشركة فى قطاع الصناعة السلع الاستهلاكية. المنهج فى تحليل البيانات هو تحليل الاحصائى باستخدام منهج smartPLs

دلت نتائج البحث ان R^2 يعنى 57% التى تعنى متغير التجنب الضريبية تقدر ان تعلم للمتغيرات CSR, DER, ROA هي 57%. واما الباقيتها تؤثر للمتغيرات الاخرى. دلت نتائج تحليل الفرضية على ان هناك تأثير كبير بين المتغير ROA على التجنب الضريبية. ولكنها عكسي بأثر DER على التجنب الضريبية الذى يؤثر عليه ولكن ليس له كبير. وغير ذلك، المتغير الاعتدال هو الرفاه الاجتماعى للشركات الذى يقوى على الاثر بين DER والتجنب الضريبية بل إضعاف الاثر بين ROA على التجنب الضريبية

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia (*Anonymous*, 2016). Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis di mana Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Keadaan ini sangat menarik bagi pengusaha yang ingin mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Keberadaan perusahaan itu sendiri menjadi suatu keuntungan bagi Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2009). Pajak merupakan sumber pendanaan yang penting bagi perekonomian Indonesia. Dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya.

Berikut ini realisasi penerimaan negara tahun 2014-2016:

Tabel 1.1.
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2014-2016 (Dalam Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2014	%	2015	%	2016	%
Penerimaan Perpajakan	980,500	73.6	1,148,300	76.7	1,146,900	74.2
Penerimaan Bukan Pajak	351.800	26.4	349,200	23.3	398,700	25.8
Jumlah/Total	1,332,300	100	1,497,500	100	1,545,600	100

Sumber: www.bps.go.id

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia sendiri semakin gencar melakukan optimalisasi pajak, terbukti dari tahun ke tahun hasilnya menunjukkan tren yang positif. Menurut Waluyo (2011) salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pembayaran pajak.

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak dimata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak melalui perlawanan terhadap pajak.

Perlawanan terhadap pajak salah satunya dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Reza, 2012). Persoalan *tax avoidance*

merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah. (Budiman dan Setiyono, 2012)

Tindakan penghindaran pajak akan mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan sedemikian rupa agar mencapai target yang diinginkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun pemerintah belum mampu merealisasikan penerimaan pajak secara maksimal. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan penghindaran pajak, ataukah memang pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal.

Dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin. Dengan begitu penerimaan negara dari sektor pajak akan bertambah dan sebaliknya jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Lalu jika dilihat dari sisi pengusaha atau wajib pajak, pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan dan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya, maka akan mengalami kerugian.

Oleh karena itu perusahaan-perusahaan juga perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat agar tetap bisa *sustainable*, dengan cara membayar pajak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Sehingga perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pemerintah bisa

mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak. Karena, apabila perusahaan terbukti melakukan penghindaran pajak maka sudah dipastikan perusahaan tersebut akan kehilangan legitimasinya di mata *stakeholder*, *shareholder* maupun masyarakat.

Menurut Watson (2011) apabila perusahaan tidak mengungkapkan CSR, hal itu menandakan bahwa perusahaan tidak memiliki tanggung sosial maka dari itu seringkali pihak yang berkepentingan membuat strategi pajak agar lebih agresif daripada yang memiliki tanggung jawab sosial. Di Indonesia yang mengatur tentang CSR yaitu Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Menurut UU PT (2007) menyatakan bahwa: “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Lanis dan Richardson (2012) berpendapat pertanggungjawaban sosial merupakan faktor utama dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan. Berdasarkan pemaparan tersebut maka perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang baik dan laporan informasi yang luas dalam hal ini tercermin dalam laporan *Corporate Social Responsibility*, tentu akan mendapat kepercayaan dari *stakeholder* dan *shareholder*. Semakin rendah pengungkapan CSR maka semakin besar peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang lebih besar maka semakin kecil peluang dalam melakukan penghindaran pajak.

Susilohadi (2008) menyatakan dalam penelitiannya, bahwa terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan demi terciptanya hubungan yang baik

antara perusahaan dengan masyarakat sehingga keberadaan perusahaan ditengah lingkungan masyarakat dapat membuat perubahan yang positif untuk lingkungan yang ditempati. Rodriguez dan Arias (2012) menyatakan bahwa terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap perusahaan dalam membayar pajak diantaranya SIZE (ukuran perusahaan), *Profitability*, *Leverage (LEV)*, dan *Capital Intensity (CAPIN)*.

Anderson dan Reeb (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai *effective tax rates (ETRs)* yang lebih tinggi. *Return On Asset (ROA)* merupakan indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Semakin banyak laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. (Setiani, 2016)

Selain ROA, salah satu indikator yang juga bisa dijadikan sebagai alat penghindaran pajak adalah *DER*. Menurut Suyanto & Supramono (2012) perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate return*) yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang

maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa pengaruh meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan. Oleh karena itu, ketika perusahaan mempunyai utang yang besar, maka pajak yang dibayarkan justru akan semakin kecil. Hal ini menyebabkan kecil kemungkinan terjadinya *tax avoidance*. (Setiani, 2016)

Berikut ini beberapa kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan global:

Tabel 1.2.
Kasus Penghindaran Pajak Perusahaan Global

No	Nama Perusahaan	Tuduhan Kasus Kecurangan
1	IKEA (2016)	IKEA dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS. Hal tersebut dilakukan IKEA pada kurun waktu 2009 hingga 2014. IKEA dituduh memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda. Dengan demikian, mereka akan terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg. Estimasi pajak yang dihindari IKEA menyebabkan hilangnya pemasukan pajak di Jerman senilai 35 juta euro atau 39 juta dollar AS, 24 juta euro atau 26 juta dollar AS di Prancis dan 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris. Sejumlah negara seperti Swedia, Spanyol dan Belgia diprediksi kehilangan pemasukan pajak dengan kisaran 7.5 juta euro hingga 10 juta euro (8.5 juta dollar AS hingga 11.2 juta dollar AS).
2	HSBC (2015)	Sejumlah orang mempergunakan kerahasiaan bank untuk memiliki rekening yang tidak diumumkan. Raksasa perbankan HSBC membantu klien dunia menghindari pembayaran pajak ratusan juta poundsterling. Banyak orang menggunakannya untuk menyembunyikan uang kontan dari petugas pajak. HSBC menghadapi penyelidikan dugaan tindakan kejahatan di Amerika Serikat, Prancis, Belgia, dan Argentina.
3	Perusahaan Investment Banking dari Amerika Serikat (2012)	Agar pembayaran bonus tidak terdeteksi, karyawan perusahaan <i>investment banking</i> cabang Inggris diminta mengajukan permohonan pinjaman lunak ke investasi banking cabang Amerika Serikat dengan dalih pinjaman lunak, karyawan investasi banking cabang Inggris tidak harus membayar pajak penghasilan. Atas hal tersebut, perusahaan <i>investment banking</i> cabang Inggris didenda 500 juta poundsterling (Rp 7.5 triliun)
4	Apple Inc (2012)	Menyembunyikan uang pendapatan senilai US\$ 11 Miliar di negara-negara yang mendapat keringanan pajak (<i>tax haven</i>) antara lain Virginia Island, Irlandia dan Luxembourg. Sehingga pajak yang dibayarkan kecil.

Lanjutan Tabel 1.2.
Kasus Penghindaran Pajak Perusahaan Global

5	Starbucks (2011)	<p>Dinyatakan rugi sebesar 112 juta poundsterling selama tahun 2008-2010 dan tidak membayar PPh badan 2011. Dalam laporan ke investor, starbucks menyatakan bahwa omset selama tahun 2008-2010, senilai 1,2 miliar poundsterling (Rp 18 triliun). Membuat laporan keuangan seolah rugi yaitu dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar Royalti <i>Offshore licensing</i> atas desain, resep dan logo ke cabangnya di Belanda. 2. Membayar bunga utang sangat tinggi di mana utang tersebut justru digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain. 3. Membeli bahan baku dari cabangnya di Swiss. Walaupun pengiriman barangnya langsung dari negara produsen dan tidak masuk ke Swiss.
6	PT Coca Cola Indonesia (2006)	<p>PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik <i>transfer pricing</i> demi meminimalisir pajak.</p>

Sumber: data diolah (2018)

Beberapa uraian fenomena yang terpapar di atas merupakan bukti bahwa penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan kesimpulan yang beragam dengan variabel independen yang beragam pula. Adapun perbedaan yang peneliti kembangkan

yaitu variabel independen yang diteliti oleh Maharani dan Suardana (2014) adalah *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif, sedangkan variabel dependen yang diteliti *Tax Avoidance*. Maharani dan Suardana (2014) melakukan penelitian pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012.

Sedangkan peneliti akan meneliti dengan variabel independen yaitu *Return On Asset (ROA)* dan *Debt to Equity Ratio (DER)*. Lalu variabel dependen yang akan peneliti gunakan yaitu *Tax Avoidance*. Selain itu, peneliti juga menambahkan CSR sebagai variabel pemoderasi yang nantinya akan memperkuat atau memperlemah pengaruh antara variabel independen dan dependen. Alasan pemilihan sektor industri barang konsumsi karena setiap tahunnya sektor ini mengalami peningkatan yang baik dari sisi penjualan, sehingga laba yang diperoleh akan cukup besar yang menyebabkan pembayaran pajak juga akan semakin besar, sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Tabel 1.3.
Pertumbuhan Sektor Industri Barang Konsumsi Tahun 2013-2015

Sektor	2013	2014	2015	%Perubahan
Industri Barang Konsumsi	5.379,8	5.554,4	5.597,0	0,77

Sumber: www.kemenperin.go.id

Selanjutnya, perusahaan di sektor ini tidak akan terpengaruh oleh krisis global karena kita tahu bahwa ada sub sektor makanan dan minuman yang *notabene* merupakan kebutuhan dasar yang memang kita butuhkan untuk sehari-hari atau bisa disebut dengan kebutuhan primer. Kita sebagai manusia tidak dapat

hidup tanpa kebutuhan primer. Jika krisis terjadi pun membuat persaingan perusahaan semakin ketat untuk berlomba mencari keuntungan agar tetap bertahan karena makanan dan minuman pasti dicari konsumen setiap harinya meskipun harga dinaikkan. Menurut LPEM (2009), sejak krisis global yang terjadi pada pertengahan 2008, hanya industri barang konsumsi yang dapat bertahan. Permintaan pada sektor tersebut tetap tinggi. Industri *food and beverage* adalah yang paling baik dan bertahan pada sektor industri barang konsumsi. Industri makanan dan minuman dapat bertahan tidak bergantung pada bahan-baku ekspor dan lebih banyak menggunakan bahan baku domestik. Kemudian karakteristik masyarakat cenderung senang berbelanja makanan, ikut membantu mempertahankan sektor industri barang konsumsi. (www.kompas.com)

Selain itu, umumnya perusahaan pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan besar tentu menjanjikan laba yang lebih tinggi, oleh sebab itu kemungkinan terjadinya penghindaran pajak lebih besar. Lalu, terkait pengungkapan CSR, menurut Ramadhani (2012) perusahaan sektor industri barang konsumsi lebih banyak memberikan pengaruh/dampak terhadap lingkungan di sekitarnya akibat dari aktivitas yang dilakukan perusahaan dan memenuhi segala aspek pada tema pengungkapan CSR. Sedangkan dalam Dewanggono (2011), perusahaan sektor industri barang konsumsi merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah sumber daya menjadi barang jadi melalui proses pabrikasi. Karena penjelasan dari penelitian terdahulu yang terkait dengan planet (lingkungan hidup) menjadi salah satu indikator CSR itulah, maka

peneliti memilih perusahaan di sektor industri barang konsumsi sebagai bahan penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016).**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat memperlemah/memperkuat pengaruh antara Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat memperlemah/memperkuat pengaruh antara *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh antara Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat memperlemah/memperkuat pengaruh antara Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

4. Untuk mengetahui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat memperlengah/memperkuat pengaruh antara *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kontribusi Teoritis

Manfaat penelitian yang diharapkan untuk kontribusi teoritis adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa jurusan manajemen, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembandingan untuk menambah ilmu pengetahuan.
- 2) Masyarakat, sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan manajemen.
- 3) Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai topik ini.

b. Kontribusi Praktis

- 1) Bagi pembuat kebijakan perpajakan, agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.
- 2) Bagi perusahaan, agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan ROA, DER, dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain. Peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian sebagai dasar acuan untuk mendukung hipotesis.

Dari beberapa penelitian terdahulu, variabel yang digunakan disetiap jurnal tidak jauh berbeda, seperti kinerja perusahaan, penggunaan derivatif keuangan, GCG, ukuran perusahaan, dan lain sebagainya. Lalu, pada tiap-tiap jurnal dihubungkan dengan aktivitas penghindaran pajak yaitu sebagai variabel dependen. Jurnal pertama yang digunakan peneliti sebagai acuan adalah jurnal yang ditulis oleh Oktavia dan Martani (2013), dimana tema yang diangkat mengenai penggunaan derivatif keuangan terhadap aktivitas penghindaran pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh antara penggunaan derivatif keuangan terhadap penghindaran pajak.

Hal serupa juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) yaitu mengenai kinerja keuangan (ROA) terhadap penghindaran pajak, dimana hasil penelitiannya membuktikan ada pengaruh secara signifikan. Selain itu, dalam penelitian ditambahkan pula berbagai variabel seperti ukuran perusahaan, GCG, dan kompensasi rugi fiskal. Hasil penelitiannya, ada pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada *tax avoidance*.

Namun variabel GCG tidak ada pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang menggunakan tema tentang kinerja keuangan juga dilakukan oleh peneliti lain seperti penelitian dari Suyanto dan Supramono (2012), Ngadiman dan Cristiany (2014), Calvin dan Sukartha (2015), serta Darmawan dan Sukartha (2014). Keempat penelitian memiliki hasil yang berbeda-beda, misalnya saja penelitian Suyanto dan Supramono (2012) serta Calvin dan Sukartha (2015) yang diketahui bahwa ada pengaruh antara *leverage* dengan penghindaran pajak. Hal itu berbeda dengan penelitian dari Ngadiman dan Cristiany (2014) serta Darmawan dan Sukartha (2014) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Selain itu ada penelitian dengan variabel yang berbeda, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) yaitu tentang pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak. Dan hasilnya ada pengaruh antara karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak. Hal serupa juga dialami oleh Dyreng (2008). Membahas tema yang sama yaitu tentang pengaruh eksekutif perusahaan terhadap penghindaran pajak, dan hasilnya ada pengaruh antara kedua variabel tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) berjudul “Pengaruh karakter eksekutif, karakter perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada *tax avoidance* di BEI”. Dimana hasil penelitiannya semua variabel berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Harrington, Christine, dan Smith (2012). Penelitian yang

dilakukan bertemakan *issue of debt*. Lalu hasilnya ada pengaruh antara *debt* terhadap penghindaran pajak.

Selain itu ada penelitian terkait *corporate social responsibility*, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi CSR semakin rendah tingkat agresivitas pajak. Insentif pajak terbukti mampu memperkuat hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak. Pengujian CSR secara bersama-sama dengan variabel kontrol menunjukkan hasil yang sama yaitu CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini diteliti oleh Warsono dan Ardianto (2015) dengan judul Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak dengan Insentif Pajak sebagai Pemoderasi. (studi pada perusahaan pertambangan di Indonesia). Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu:

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Swingly Calvin dan I Made Sukartha. (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> pada <i>Tax Avoidance</i> .	Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Sales Growth</i> , <i>Leverage</i> dan Penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>).	Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).
2	Warsono dan Yuli Ardianto (2015)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Agresivitas Pajak dengan Insentif Pajak sebagai Pemoderasi. (studi pada perusahaan pertambangan di Indonesia)	Agresivitas pajak, CSR, dan insentif pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi CSR semakin rendah tingkat agresivitas pajak. Insentif pajak terbukti mampu memperkuat hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak. Pengujian CSR secara bersama-sama dengan variabel kontrol menunjukkan hasil yang sama yaitu CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Lanjutan Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

3	Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati. (2014)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakter Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap <i>Tax Avoidance</i> Di BEI.	Risiko Perusahaan, Multinational Company, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).	Risiko perusahaan, kualitas audit dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).
4	I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha. (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> , <i>Return On Assets</i> dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak.	<i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>ROA</i> dan Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).	<i>Corporate Governance</i> , <i>Return On Assets</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).
5	Ngadiman dan Puspitasari Christiany. (2014)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012.	<i>Leverage</i> , Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>), Kepemilikan Institusional dan ukuran perusahaan.	Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).
6	Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari. (2013)	Pengaruh <i>ROA</i> , <i>Leverage</i> , <i>GCG</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada <i>Tax Avoidance</i> .	<i>ROA</i> , <i>Leverage</i> , Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>), Komposisi Komisaris Independen, Keberadaan Komite Audit dan Kompensasi Rugi Fiskal.	<i>Return On Assets</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).
7	Oktavia dan Dwi Martani. (2013)	Tingkat Pengungkapan dan Penggunaan Derivatif Keuangan dalam Aktivitas Penghindaran Pajak.	Tingkat Pengungkapan Derivatif Keuangan, Penggunaan Derivatif Keuangan dan Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).	Penggunaan derivatif keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>).

Lanjutan Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

8	Judi Budiman dan Setiyono. (2012)	Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).	Penghindaran Pajak (<i>tax avoidance</i>), Variabel control yaitu <i>Sales Growth, Net operating Loss</i> .	Karakter eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).
9	Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono. (2012)	Likuiditas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.	<i>Leverage</i> dan Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>), Likuiditas, Komisaris Independen dan Manajemen Laba.	<i>Leverage</i> , komisaris independen, dan manajemen laba berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).
10	Christine Harrington and Walter Smith. (2012)	<i>Tax Avoidance and Corporate Capital Structure</i> .	<i>Leverage</i> , Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>), <i>Issue of Debt</i> .	<i>Debt</i> berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).
11	Hanlon Dyreng. (2008)	<i>The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance</i> .	Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>), Eksekutif Perusahaan.	Eksekutif perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).

Sumber: Data diolah, (2017)

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu pada tabel diatas, akhirnya peneliti ingin meneliti kembali permasalahan yang sama yaitu tentang kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak. Peneliti akan meneliti dengan variabel independen yaitu *Return On Asset (ROA)* dan *Debt to Equity Ratio (DER)*. Lalu variabel dependen yang akan peneliti gunakan yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Selain itu, peneliti juga menambahkan CSR sebagai variabel pemoderasi yang nantinya akan memperkuat atau memperlemah pengaruh antara variabel independen dan dependen. Berikut ini merupakan tabel perbedaan dan persamaan penelitian:

Tabel 2.2.
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
Peneliti menggunakan variabel tambahan sebagai pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu dengan menambahkan variabel pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> sebagai variabel pemoderasi.	Penelitian akan membahas tentang kinerja keuangan. Khususnya tentang ROA (<i>return on asset</i>) dan DER (<i>debt to equity ratio</i>) yang akan digunakan sebagai variabel independen. Lalu sebagai variabel dependennya, peneliti menggunakan penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).

Sumber: Data diolah, (2017)

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Brigham dan Houston (2006), manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan yaitu pemegang saham untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan antara manajer dan principal yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*). Hubungan keagenan manajer dan principal dapat memicu adanya asimetris informasi dimana manajemen sebagai pihak yang memiliki akses langsung terhadap informasi perusahaan tidak mengungkapkan beberapa informasi kepada pihak eksternal perusahaan termasuk investor sebagai prinsipal (Jansen *et al.*, 2012).

2.2.2. *Pecking Order Theory*

Pecking order theory dimulai dengan terdapatnya informasi asimetris dimana manajer memiliki informasi lebih banyak mengenai prospek perusahaan. Informasi asimetris mempengaruhi pilihan pendanaan antara sumber dana internal dan sumber dana eksternal, sehingga *pecking order theory* biasanya digunakan dalam pendanaan proyek baru. Berdasarkan teori ini biaya ekuitas baru sangat mahal bagi perusahaan karena terdapat asimetri informasi, sehingga perusahaan

memilih membiayai investasi mereka dengan menggunakan dana internal kemudian hutang dan terakhir dengan ekuitas.

2.2.3. Teori Akuntansi Positif

Teori Akuntansi Positif sangat erat kaitannya dengan praktik manajemen laba, karena teori ini merupakan teori yang menjelaskan praktik manajemen laba dalam perusahaan. Teori akuntansi positif dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1986) dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain didalam perusahaan. Menurut Watt and Zimmerman (1986), dalam teori akuntansi positif terdapat hipotesis acuan dalam menjelaskan dan memprediksi gejala atau peristiwa manajemen laba dalam akuntansi yaitu hipotesis biaya politik (*Political Cost Hypothesis*)

Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar biaya politik yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar kemungkinan manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menanggukkan laba tahun sekarang ke laba tahun depan. Dengan adanya biaya politik yang lebih besar maka akan membagi kemakmuran perusahaan kepada lebih banyak pihak, maka laba tahun sekarang ditransfer ke laba tahun depan agar laba tahun sekarang menjadi lebih sedikit. Hal ini dilakukan untuk menghindari biaya politik yang akan dikenakan oleh pemerintah.

2.2.4. Trade Off Theory

Trade Off Theory pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Modigliani dan Miller dalam sebuah artikel *American Economic Review* yang

berjudul *Corporate Income Taxes on the Cost of Capital*. Dalam teori ini menjelaskan ide bahwa berapa banyak utang perusahaan dan berapa banyak ekuitas perusahaan sehingga terjadinya keseimbangan antara biaya dan keuntungan.

Trade off theory berasumsi bahwa adanya manfaat pajak akibat penggunaan utang, sehingga perusahaan akan menggunakan utang sampai tingkat tertentu untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Esensi *trade off theory* dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan utang. Sejauh manfaat lebih besar, tambahan utang masih diperkenankan. Apabila pengorbanan karena penggunaan utang sudah lebih besar, maka tambahan utang sudah tidak diperbolehkan. Penggunaan utang 100% sulit dijumpai dalam praktik dan hal tersebut ditentang oleh *trade off theory*.

Kenyataannya, semakin banyak utang, semakin tinggi beban yang harus ditanggung perusahaan, seperti biaya kebangkrutan, biaya keagenan, beban bunga yang semakin besar dan sebagainya. *Trade off theory* telah mempertimbangkan berbagai faktor seperti *corporate tax*, biaya kebangkrutan, dan *personal tax* dalam menjelaskan mengapa suatu perusahaan memilih suatu struktur modal tertentu (Husnan, 2000).

2.2.5. *Slack Resource Theory*

Slack Resource Theory merupakan suatu teori di mana perusahaan harus mempunyai posisi keuangan yang baik untuk memberikan kontribusi pada kinerja sosial perusahaan. Kinerja sosial membutuhkan dana sehingga kinerja keuangan harus diperhatikan terlebih dahulu.

2.2.6. *Stakeholder Theory*

Konsep umum *stakeholder* adalah definisi ulang dari organisasi yaitu, bagaimana organisasi itu seharusnya dan bagaimana organisasi tersebut harus dikonseptualisasikan. Tujuan organisasi adalah mengelola kepentingan dan kebutuhan para *stakeholder* dengan berbagai sudut pandang, sehingga pemangku kepentingan akan dipenuhi oleh para pengelola perusahaan. Menurut Anggraeni (2011) teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*, *shareholders*, pemerintah, dan masyarakat.

2.2.7. *Legitimacy Theory*

Teori legitimasi secara langsung berkaitan dengan kinerja keuangan. Teori legitimasi menunjukkan bahwa dengan tidak mengelola reputasi perusahaan akan mengalami penurunan kinerja perusahaan. Clarke (1998) menguji apakah teori ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan, dan hasilnya menunjukkan teori legitimasi mendorong perusahaan untuk melaporkan CSR.

Keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan didasarkan pada tindakan perusahaan untuk mampu memenuhi norma-norma dan nilai-nilai yang diterapkan dalam masyarakat dimana perusahaan berada. Oleh karena itu, ketika sebuah perusahaan berhasil dengan strategi CSR, maka hasilnya masyarakat akan memberikan legitimasinya dan reputasi yang positif kepada perusahaan. Salah satu cara perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat dengan menggunakan pelaporan CSR sebagai strategi instrumen perusahaan untuk menginformasikan aktivitas sosial mereka.

2.2.8. Pajak

2.2.8.1. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Resmi (2013) adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, dan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat secara umum.

2.2.8.2. Manajemen Pajak

Manajemen perpajakan menurut Pohan (2013) adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi. Hal tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Fungsi fungsi manajemen pajak menurut Zain (2003) adalah: 1) perencanaan pajak (*tax planning*), 2) pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), 3) pengendalian pajak (*tax control*).

2.2.8.3. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Simarmata (2012) merupakan bagian dari manajemen perpajakan serta tahap awal untuk melakukan analisis secara sistimatis berbagai alternative perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Strategi perencanaan pajak menurut Harnanto (2013) yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu: 1) penghematan pajak (*tax saving*), 2) penghindaran pajak (*tax aviodance*), 3) mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, 4) menghindari pemeriksaan

pajak dengan cara membayar pajak secara lebih, 5) menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku.

2.2.8.4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak adalah salah satu strategi dari manajemen pajak dimana menurut Prasiwi (2015) merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak, yang secara ekonomis berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) untuk dibagikan kepada investor maupun untuk diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

Meminimalisir beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih sesuai peraturan perpajakan (*lawful*) yang sering disebut penghindaran pajak maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) yang disebut penggelapan pajak (Dyreng, 2008). Slemrod dan Yitzhaki (2002) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa perbedaan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah aspek legalitasnya.

Simarmata (2012) menyatakan ada tiga karakter dari *tax avoidance* yaitu adanya unsur *artificial arrangement*, seringkali memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang, dan terdapat unsur kerahasiaan sehingga perusahaan pasti mempunyai konsultan yang mengurus tentang pembayaran pajak.

Pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Yoehana (2013) dalam penelitiannya dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

2.2.8.5. Kajian Islam Tentang Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hasyr: 18)

Shihab (2007) menyebutkan, “wahai orang-orang yang beriman, berlindunglah kalian dari azab Allah dengan selalu mematuhi-Nya. Hendaknya setiap orang memikirkan apa saja amalan yang dipersiapkan untuk hari esok. Selalu bertakwalah kepada Allah. Allah benar-benar mengetahui dan akan membalas segala sesuatu yang kalian kerjakan.”

Irmin (2005) dalam buku *Kepemimpinan Melalui Asmaul Husna* manafsirkan atas ayat tersebut bahwa: Allah sebagai pencipta, Allah sebagai perencana semua makhluk ciptaannya, Allah adalah maha merencanakan. Pada dasarnya manajer atau pemimpin yang harus mempunyai banyak konsep tentang manajemen termasuk di dalamnya perencanaan. Pemimpin yang baik adalah yang mempunyai visi dan misi, dan membangun kedua hal tersebut agar berjalan sesuai dengan tujuan bersama serta hasil dari perencanaan yang baik dan matang.

Di samping itu kata “*perhatikanlah*” menurut Imam Al-Ghazali mengandung makna bahwa manusia harus memperhatikan dari setiap perbuatan yang dia kerjakan, serta harus mempersiapkan diri (merencanakan) untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok.

Manusia harus kembali ke Tuhan-Nya dengan selamat dan sejahtera. Proses selamat tersebut harus dimulai dari dunia ini yang diwujudkan dengan tingkah laku yang baik, sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat Al-Hasyr ayat 18 tersebut yaitu kata: ” *hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dalam surat tersebut,*” dan kata itu menekankan adanya perencanaan yang baik dalam diri manusia atas segala tindakan selama di dunia sehingga ia akan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Hadhiri (2010), menyatakan dalam setiap langkah gerak, manusia harus introspeksi memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk kebaikan masa depan, dengan kata lain berarti manusia harus memiliki rencana, sehingga manusia hidupnya terarah dan tidak terjerumus ke lubang yang sama.

Disisi lain penghindaran pajak ini juga suatu hal terkait dengan praktik menunda-nunda. Salah satu praktik penghindaran pajak adalah menunda pembayaran pajak perusahaan. Dan dalam islam menunda-nunda ini merupakan hal yang buruk. Berikut ayat terkait dengan kegiatan menunda-nunda:

يُنَادُوهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ
وَعَرَّيْتُمْ الْأُمَانِي حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿١٤﴾

Artinya:

“Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang mukmin) seraya berkata: "Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kalian?" Mereka (orang-orang mukmin menjawab: “Iya Benar, tetapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri dan kalian menunggu dan kalian ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah; dan kalian telah ditipu terhadap Allah oleh (setan) yang amat penipu.” (QS. Al Hadid: 14)

Shihab (2009) menyebutkan bahwa orang-orang munafik itu menyeru orang-orang Mukmin, "Bukankah di dunia dulu kami adalah teman kalian?" Orang-orang Mukmin menjawab, "Ya, benar apa yang kalian katakan itu. Tetapi kalian membinasakan diri sendiri dengan bersikap munafik, menginginkan suatu keburukan menimpa kaum mukminin, membuat keragu-raguan dalam urusan agama dan tertipu oleh angan-angan. Selama itu kalian tampak baik-baik saja hingga datang kematian dan kalian ditipu oleh setan bahwa kalian akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dari tafsir diatas, dapat disimpulkan bahwa menunda-nunda amal merupakan tipuan iblis. Karena dalam hal ini melakukan penundaan pembayaran pajak berarti juga menunda untuk melakukan kegiatan partisipasi yang nantinya berguna untuk kepentingan masyarakat. Konsep ini tentunya serupa dengan konsep berzakat yaitu sama-sama untuk kepentingan umat, hanya saja bedanya terletak pada kepada siapa kewajiban itu dilakukan.

2.2.9. *Return On Asset (ROA)*

2.2.9.1. Pengertian *Return On Asset (ROA)*

ROA adalah salah satu rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktifitas yang digunakan untuk aktifitas operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktifitas yang digunakan untuk aktifitas operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Ang, 2007). Berikut ini rumus untuk menghitung ROA: (Wiagustini, 2010)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

2.2.9.2. Kajian Islam tentang ROA

Islam tidak melarang seorang pebisnis muslim untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari aktivitas bisnis. Karena memang pada dasarnya semua aktivitas bisnis adalah termasuk dalam aspek muamalah yang memiliki dasar kaidah memperbolehkan segala sesuatu sepanjang diperoleh dan digunakan dengan cara-cara yang dibenarkan syariah. Tingkat laba atau profit margin berapa pun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezhaliman dalam praktek pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syariah sekalipun mencapai margin 100% dari modal bahkan beberapa kali lipat.

Menurut Al Qur'an, bisnis yang menguntungkan adalah bukan hanya dengan melakukan ukuran yang benar dan timbangan yang tepat, tetapi juga dengan menghindarkan segala bentuk dan praktek kecurangan yang kotor dan korup sebagaimana yang diungkapkan dalam Surah Al A'raaf ayat 85 dan Surah Al Israa' ayat 35 berikut ini:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَنْقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ
 غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ ۗ فَارْوُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا
 تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسُدُوا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ وِصْلٰحِهَا ۗ ذٰلِكُمْ
 خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨٥﴾

Artinya:

“Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu

kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (QS. Al A'raaf: 85)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



Artinya:

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. Al Israa': 35)

Shihab (2009) menyebutkan dalam Al Qur'an menekankan bahwa sebuah bisnis yang kecil lewat jalan halal dan *thayyib* (baik), jauh lebih baik daripada bisnis besar yang dilakukan dengan cara yang haram dan *khabits* (jelek). Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa dalam semua kegiatan transaksi jual beli itu diperbolehkan kecuali terdapat ayat yang mengharamkannya dan transaksi tersebut tidak merugikan antara kedua belah pihak. Dalam hal ekonomi islam mempunyai visi misi untuk mendapatkan target hasil yaitu profit materi dan benefit non materi, dalam arti tidak hanya menuntut profit (qimah madiyah atau nilai materi) setinggi- tingginya namun juga harus mampu memperoleh dan memberikan manfaat kemanusiaan yang berupa bantuan sosial.

2.2.10. Debt to Equity Ratio (DER)

2.2.10.1. Pengertian Debt to Equity Ratio

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang membandingkan jumlah Hutang terhadap ekuitas. Rasio ini sering digunakan para analis dan para investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Semakin tinggi angka DER

maka diasumsikan perusahaan memiliki resiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaannya.

Riyanto (2013), “rasio utang dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya (baik hutang jangka pendek maupun utang jangka panjang)”. Tarjo (2010) menyatakan nilai perusahaan ditentukan oleh struktur modal dan salah satu struktur modal perusahaan adalah diperoleh melalui hutang. Berikut ini merupakan rumus dalam menghitung besarnya DER suatu perusahaan: (Hery, 2015)

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas}}$$

2.2.10.2. Kajian Islam tentang DER

Tujuan utama dari pilihan struktur modal sudah pasti adalah untuk mendapatkan gabungan antara dana modal dengan biaya rendah yang dapat ditanggung. Bunga pinjaman yang rendah, pada gilirannya, memaksimalkan keuntungan dan kekayaan pemegang saham. Yang harus diingat pinjaman dengan beban bunga dilarang dalam islam. Dalam alquran terdapat landasan pelarangan riba adalah sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya terkamu mendapatkan keberuntungan.” (QS. Ali Imran: 130)

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya:

“Dan disebabkan memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (QS. An-Nisa’: 161)

Lembaga pengkajian fiqih islam berpandangan bahwa para pemerintah di berbagai negeri islam berkewajiban untuk tidak membiarkan bursa-bursa tersebut melakukan aktivitas mereka sesuka hati dengan membuat berbagai transaksi dan jual beli di negara-negara mereka, baik hukumnya mubah maupun haram. Allah berfirman: (Sutedi, 2011)

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

Artinya:

“dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa (QS. Al-An’aam: 153)

Shihab (2009) menyebutkan bahwa Alqur’an tidak mencela hutang, dengan menganjurkan secara rinci cara mencatat hutang.

2.2.11. Corporate Social Responsibility (CSR)

2.2.11.1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)

Pengertian CSR menurut Hadi (2011) “CSR is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact to society”.

Definisi ini pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana mengelola

perusahaan baik sebagian maupun keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Maka dari itu, perusahaan harus mampu mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

2.2.11.2. Konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Satu terobosan besar perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dikemukakan oleh Eklinton (1997) yang terkenal dengan “*The Triple Botton Line*” yang dimuat dalam buku “*Canibalts with Forks the Triple Botton Line of Twentieth Century Business*”. Konsep tersebut mengakui jika perusahaan ingin *sustain* maka perlu memperhatikan 3P yaitu bukan hanya profit yang diburu, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Konsep *Triple Botton Line* tersebut merupakan kelanjutan dari konsep *sustainable development* yang secara eksplisit telah mengaitkan antara dimensi tujuan dan tanggung jawab baik kepada *shareholder* maupun *stakeholder* (Hadi, 2011).

2.2.11.3. Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Hadi (2011) mengurai prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan menjadi 3 yaitu :

- 1) *Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktifitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan.

2) *Accountability*, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktifitas yang telah dilakukan.

3) *Transparency*, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman khususnya informasi dan pertanggung-jawaban berbagai dampak dari lingkungan.

2.2.11.4. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Hadianto (2013), menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *corporate social responsibility disclosure* merupakan cara mengkomunikasikan informasi sosial kepada *stakeholders*. Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia adalah merujuk standar yang dikembangkan oleh *Global Reporting Initiatives (GRI)*.

Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan *sustainability reporting*. *Global Reporting Initiative (GRI)* adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah memelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia.

Corporate Social Responsibility dihitung dengan 91 indikator berdasarkan GRI-G4. GRI-G4 (2013) menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung pendekatan yang terstandardisasi dalam pelaporan, yang mendorong tingkat transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk membuat

informasi yang disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat. Fitur yang ada di GRI-G4 menjadikan pedoman ini lebih mudah digunakan, baik bagi pelapor yang berpengalaman dan bagi mereka yang baru dalam pelaporan keberlanjutan dari sektor apapun. (Sumber: www.globalreporting.org)

2.2.11.5. Kajian Islam tentang Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Othman dan Thani (2010) menyatakan bahwa dalam perspektif pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, terdapat dua prinsip penting terkait konsep akuntabilitas dalam islam yaitu prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan konsep akuntabilitas sosial. Konsep akuntabilitas sosial menurut islam terkait dengan prinsip *full disclosure*, yang mana penyedia laporan keuangan harus mengungkapkan segala sesuatu yang dinilai penting bagi *stakeholder*.

Pengungkapan CSR dalam Islam tidak hanya dilakukan sebagai langkah untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan. Islam menganggap masalah yang berkaitan dengan perilaku etis sebagai bagian penting dari tatanan moral. Al Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa pengusaha harus berbuat baik dan bertindak sesuai dengan perintah Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177:

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ

الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: 177)

Shihab (2007) menyebutkan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat daripada hanya sekedar menghadapkan wajah kita ke barat dan ke timur dalam shalat. Tanpa mengesampingkan akan pentingnya shalat dalam Islam, Al Quran mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan nilai-nilai sosial. Di samping memberikan nilai keimanan berupa iman kepada Allah SWT, Kitab-Nya, dan Hari Kiamat, Al Quran menegaskan bahwa keimanan tersebut tidak sempurna jika tidak disertai dengan amalan-amalan sosial berupa kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan.

Selain itu, pelaksanaan CSR dalam Islam juga merupakan salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua

anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. (Yusanto dan Yunus, 2009)

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (QS. Al-Hasyr: 7)

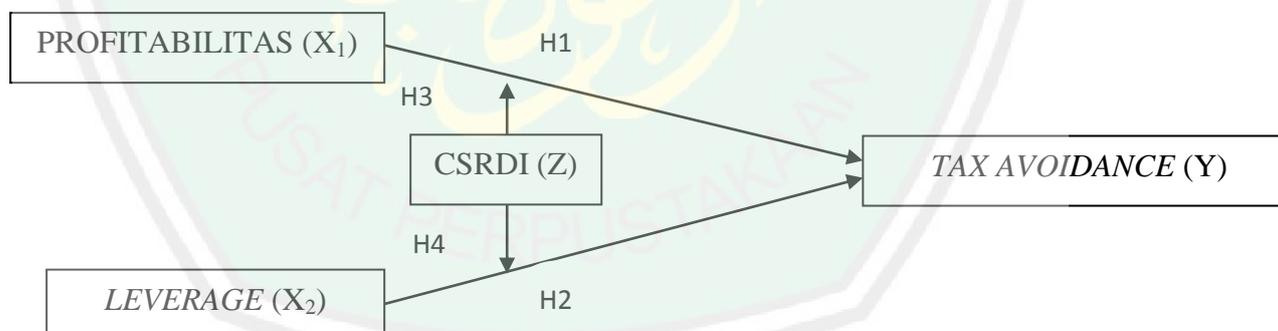
Shihab (2007) menyebutkan bahwa harta penduduk kampung yang Allah serahkan kepada Rasul-Nya tanpa mencepatkan kuda atau unta adalah milik Allah, Rasul-Nya, kerabat Nabi, anak yatim, orang miskin, dan *ibn sabîl* (musafir di jalan Allah). Hal itu dimaksudkan agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya di antara kalian saja. Hukum- hukum yang dibawa oleh Rasulullah itu harus kalian pegang, dan larangan yang ia sampaikan harus kalian tinggalkan. Hindarkanlah diri kalian dari murka Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar kejam siksa-Nya.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa islam telah mengatur dengan begitu jelas tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pengungkapan CSR, seperti berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Isu CSR sendiri baru dimulai pada abad ke-20. Bahkan dalam berbagai *code of*

conduct yang dibuat oleh beberapa lembaga, islam telah memberikan penjelasan terlebih dahulu. Misalnya, dalam draft ISO 26000, Global Reporting Initiatives (GRI), UN Global Compact, International Finance Corporation (IFC), dan lainnya telah menegaskan berbagai instrumen indikator bagi pelaksanaan komitmen CSR perusahaan demi pemenuhan target pembangunan berkelanjutan seperti isu lingkungan hidup, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, tata kelola perusahaan, praktik operasional yang adil, dan pengembangan masyarakat. Dan bila diteliti lebih lanjut, sebenarnya prinsip-prinsip tersebut merupakan representasi berbagai komitmen yang dapat bersinergi dengan pengamalan prinsip kehidupan islami.

2.3. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual



Sumber: Azwar (2011)

Dari gambar kerangka konseptual diatas, dijelaskan bahwa profitabilitas yang diukur dengan *return on asset (ROA)* dapat mempengaruhi penghindaran pajak dimoderasi dengan pengungkapan CSR. Lalu dijelaskan pula leverage yang diukur dengan *debt to equity ratio (DER)* dapat mempengaruhi penghindaran pajak dimoderasi dengan pengungkapan CSR. Variabel pemoderasi adalah

variabel yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dari gambar diatas pengungkapan CSR merupakan variabel pemoderasi sehingga variabel tersebut dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara ROA terhadap penghindaran pajak dan DER terhadap penghindaran pajak.

Tanggungjawab sosial perusahaan merupakan cerminan hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitar perusahaan sehingga dapat mencerminkan kualitas dari perusahaan tersebut. Pengungkapan tanggung jawab sosial diharapkan dapat mempengaruhi keputusan investor untuk pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi tersebut dapat meningkatkan penghasilan perusahaan. Dan juga dengan adanya pengungkapan CSR ini, diharapkan proses pembayaran pajak lebih transparan dan praktik penghindaran pajak nantinya bisa diminimalisasi.

2.4. Hipotesis Penelitian

2.4.1. Hubungan Profitabilitas dengan *Tax Avoidance*

Apabila profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profit perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. (Setiani, 2016)

H1: Jika Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan, maka tingkat penghindaran pajak akan meningkat.

2.4.2. Hubungan *Leverage* dengan *Tax Avoidance*

Kasmir (2010) menyatakan bahwa DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan.

Dengan begitu semakin tinggi nilai dari DER, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar, Darmawan dan Sukartha (2014). Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan. Hasil penelitian Supramono (2010) menunjukkan DER berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H2: Jika *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan, maka tingkat penghindaran pajak akan meningkat.

2.4.3. Hubungan Profitabilitas dan *Tax Avoidance* dengan CSR sebagai variabel pemoderasi

Dalam menjalankan usahanya perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba/profit yang maksimal. Akan tetapi perusahaan memiliki juga kewajiban untuk membayar pajak. Beban pajak yang dibayarkan perusahaan akan

berdampak pada berkurangnya laba perusahaan. Untuk tetap menjaga atau mengoptimalkan laba perusahaan maka upaya meminimalkan beban pajak dilakukan melalui praktik penghindaran pajak. Sesuai konsep *triple bottom line*, perusahaan diwajibkan untuk mampu menyeimbangkan kinerja ekonomi melalui pencapaian laba, kinerja lingkungan melalui kepedulian terhadap lingkungan alam sekitar, dan kinerja sosial melalui kepedulian terhadap masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Lanis dan Richardson (2012) menunjukkan bahwa profitabilitas suatu perusahaan menjadi hal penting dalam kegiatan CSR yang berdampak negatif terhadap agresivitas penghindaran pajak. Perusahaan dengan kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak. Hal serupa diungkapkan oleh Watson (2011) perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial menunjukkan agresivitas pajak yang lebih besar. Dengan melakukan aktivitas CSR maka biaya-biaya yang dikeluarkan akan mengurangi laba perusahaan, yang berakibat pada kecilnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan.

H3: *Corporate Social Responsibility* memperkuat pengaruh antara Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.4. Hubungan *Leverage* dan *Tax Avoidance* dengan CSR sebagai variabel pemoderasi

Keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif, hal tersebut dikarenakan ada peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan. Keputusan

pendanaan yang dimaksud adalah perusahaan lebih memilih menggunakan pendanaan internal atau eksternal. Perusahaan yang lebih memilih menggunakan pendanaan eksternal seperti utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang dapat menjadi pengurang laba kena pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Adelina (2012) menyatakan bahwa penambahan jumlah utang akan mengakibatkan menambahnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Penelitian terkait dengan *DER* yang dilakukan oleh Noor (2010) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan cenderung lebih rendah.

Penelitian lain dari Calvin dan Sukartha (2015) menunjukkan bahwa *DER* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Maka, jika variabel CSR dikaitkan dengan *DER* dan penghindaran pajak justru akan menolak penelitian yang dilakukan oleh Noor, bahwa ketika laporan mengenai utang atau beban perusahaan diungkapkan, maka praktik penghindaran pajak justru akan semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H4: *Corporate Social Responsibility* memperkuat pengaruh antara *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian kausal komparativ, yaitu penelitian yang meneliti hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih, sehingga dapat menjelaskan dampak perubahan variasi nilai dalam suatu variabel. Dalam hal ini bertujuan meneliti hubungan sebab akibat ROA dan DER terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), lalu dikuatkan atau dilemahkan dengan variabel pemoderasi yaitu pengungkapan CSR. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menyajikan tahap lebih lanjut dari observasi.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil data di Galeri Investasi BEI-UIN Maulana Malik Ibrahim, Jalan Gajayana No. 50 Malang, Social Building 3rd floor.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri – ciri yang telah ditetapkan (Nazir, 2003). Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan dalam sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016 sebanyak 39 perusahaan dari sub sektor makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik, barang keperluan rumah tangga, dan peralatan rumah tangga. Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada metode

nonprobability sampling tepatnya teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan harus mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan yang lengkap selama tahun 2014-2016.
2. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian atau nilai laba positif.
3. Ada pengungkapan CSR dalam laporan tahunan secara berturut-turut selama tahun 2014-2016

3.4. Teknik Pengambilan Sampel

Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada metode *nonprobability sampling* tepatnya teknik *purposive sampling*.

3.5. Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian data sekunder yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui media perantara. Data sekunder tersebut berupa laporan tahunan perusahaan, laporan tahunan tersebut digunakan untuk mengetahui kinerja ROA dan DER, praktik penghindaran pajak serta untuk mengetahui pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan sektor industri barang konsumsi. Data-data ini diperoleh dari situs BEI yaitu www.bursaefekindonesia.co.id.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, dimana pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan kebutuhan penelitian, seperti data keuangan dari laporan keuangan tahunan perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016.

3.7. Definisi Operasional Variabel

3.7.1. Variabel Dependen

Pengukuran menggunakan GAAP *Effective Tax Rate* (ETR) ini mengacu pada pengukuran yang telah dilakukan oleh Octaviana dan Rohman (2014). GAAP ETR menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total laba sebelum pajak. Menurut Hanlon dan Heintzman (2010) pendekatan GAAP ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan tangguhan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan GAAP ETR karena penelitian pajak empiris baru-baru ini telah menemukan bahwa GAAP ETR telah merangkum penghindaran pajak dan menunjukkan sebagai ukuran yang paling sering digunakan oleh para peneliti akademik seperti Winarsih (2014), Octaviana dan Rohman (2014), serta Yoehana (2013). Lanis dan Richardson (2012) mengindikasikan ETR yang rendah menjadi indikator kunci atau tanda agresivitas perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan

kena pajak (PKP) mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. Jadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diproksikan dengan menggunakan *Effective Tax Rates (ETR)*, yang dirumuskan sebagai berikut: (Yoehana, 2013)

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

3.7.2. Variabel Independen

Variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diukur dengan *return on assets (ROA)*. Rasio profitabilitas merupakan salah satu cara yang umum digunakan dalam menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan disamping rasio lainnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kekuatan maupun kelemahan perusahaan dalam menghasilkan laba operasinya secara keseluruhan. Dimana ROA dihitung dengan menggunakan rumus: (Wiagustini, 2010)

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

Rasio hutang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi hutang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari milik perusahaan. Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang kelayakan kredit dan resiko keuangan debitor. Semakin tinggi *Debt to Equity Ratio* mencerminkan risiko perusahaan relatif tinggi karena perusahaan dalam operasinya menggunakan utang dan

perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga atas utang, akibatnya para investor cenderung menghindari saham-saham yang memiliki nilai *Debt to Equity Ratio* yang tinggi. Berikut ini merupakan rumus DER: (Hery, 2015)

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas}}$$

3.7.3. Variabel Moderasi

Variabel moderasi yang digunakan adalah pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*. Pengungkapan CSR adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan di dalam laporan tahunan. Instrumen pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada GRI-G4. Instrument pengukuran *CSRDI (Corporate Social Responsibility Disclosure Index)* dilakukan dengan menggunakan pendekatan dikotomi. Rumus perhitungan *CSRDI* menurut Sayekti dan Wondabio (2007):

$$CSRDI = \frac{\sum X}{N}$$

Dimana:

CSRDI : *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan

$\sum X$: total angka atau skor yang diperoleh masing – masing perusahaan

N : jumlah *item* untuk perusahaan

dummy variable: 1=jika *item* i diungkapkan; 0=jika *item* i tidak diungkapkan.

3.8. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik dengan menggunakan aplikasi *smartPLS*. Adapun model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

$$ETR = \alpha + \beta_1 ROA + \varepsilon$$

$$ETR = \alpha + \beta_2 DER + \varepsilon$$

$$ETR = \alpha + \beta_1 ROA + \beta_1 ROA * CSR + \varepsilon$$

$$ETR = \alpha + \beta_2 DER + \beta_2 DER * CSR + \varepsilon$$

$$ETR = \alpha + \beta_1 ROA + \beta_1 ROA * CSR + \beta_2 DER + \beta_2 DER * CSR + \varepsilon$$

Dimana:

α = Konstanta

ε = Koefisien error dalam model

Partial least square (PLS) merupakan pendekatan yang lebih tepat untuk tujuan prediksi. PLS pertama kali dikembangkan oleh Herman Wold, beliau adalah pegawai dari Karl Joreskog (yang mengembangkan AMOS). Model ini dikembangkan sebagai alternatif untuk situasi dimana teorinya lemah atau indikator yang tersedia tidak memenuhi model pengukuran refleksif. PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* karena dapat diterapkan pada semua skala data, tidak membutuhkan banyak asumsi dan ukuran sampel tidak harus besar. PLS selain dapat digunakan sebagai konfirmasi teori juga dapat digunakan untuk merekomendasikan hubungan yang ada atau belum dan juga mengusulkan proposisi pengujian selanjutnya.

Selain itu berhubungan dengan sampel *size*, maka sampel dalam PLS dapat diperkirakan dengan: Sepuluh kali jumlah jalur struktural (struktural path)

pada *inner model*, dan Sampel size kecil 30-50 atau sampel besar lebih dari 200. Pengujian model empiris penelitian ini berbasis *variance Partial Least Square* (PLS) dengan [software SmartPLS](#). Pengujian *goodness of fit* dilakukan baik pada tahapan pengukuran variabel ([outer model](#)) dengan melihat nilai estimasi loading karena penelitian ini seluruh variabel laten diukur dengan indikator bersifat reflektif, maka evaluasi terhadap model pengukuran dapat dilakukan melalui *convergent validity*, jika nilai estimasi loading $\geq 0,50$ dan nilai titik kritis (*critical ratio/CR*) signifikan pada tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 0,05$. *Discriminant validity* dengan melihat nilai AVE (*Average Variance Extracted*), yang direkomendasikan nilai AVE lebih besar dari 0,50 dan nilai *composite reliability* lebih besar atau sama dengan 0,70.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek yang diambil dalam penelitian ini terkait dengan perusahaan-perusahaan dalam sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016 sebanyak 39 perusahaan dari sub sektor makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik, barang keperluan rumah tangga, dan peralatan rumah tangga (www.sahamok.com.)

Perusahaan makanan dan minuman tidak akan terpengaruh oleh krisis global, karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang memang kita butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari atau bisa disebut dengan kebutuhan primer. Kita sebagai manusia tidak dapat hidup tanpa kebutuhan primer. Jika krisis terjadi pun, sektor ini akan bertahan dari persaingan yang mungkin timbul, karena makanan dan minuman pasti dicari konsumen setiap harinya meskipun harga dinaikkan.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang mengindikasikan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan representasi dari populasi yang ada, serta sesuai dengan tujuan dari penelitian.

Data yang digunakan yaitu diambil dari laporan tahunan dan laporan keuangan auditan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 yang diperoleh melalui website www.idx.co.id. Berikut ini tabel kriteria penarikan sampel penelitian:

Tabel 4.1.
Kriteria Penarikan Sampel

Keterangan	Jumlah Perusahaan
Populasi Perusahaan	39
Dikurangi:	
1. Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan (<i>annual report</i>) dan laporan keuangan selama tahun 2014-2016 secara berturut-turut	(15)
2. Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun penelitian atau nilai laba negatif.	(7)
3. Perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR dalam laporan tahunan secara berturut-turut selama tahun 2014-2016.	(4)
Jumlah Perusahaan yang terpilih sebagai sampel	13
Data dalam 3 tahun penelitian	39

Sumber: Data sekunder diolah, (2017)

Jumlah perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2016 berjumlah 39 perusahaan. Dari 39 perusahaan industri barang konsumsi tersebut terdapat 15 perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan selama tahun 2014 hingga 2016. Selain itu, terdapat 7 perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun penelitian. Serta ada 4 perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR dalam laporan tahunan. Sehingga jumlah perusahaan industri barang konsumsi yang dapat dijadikan sampel adalah sebanyak 13 perusahaan. Sedangkan total pengamatan yang dijadikan sampel penelitian selama 3 tahun sebanyak 39 data. Berikut ini adalah nama-nama perusahaan di sektor industri barang konsumsi

yang menjadi sampel dalam penelitian sesuai dengan kriteria penarikan sampel di atas:

Tabel 4.2.
Daftar Sampel Perusahaan

No.	Kode	Perusahaan
1	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
2	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
3	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
4	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
5	MYOR	Mayora Indah Tbk
6	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk
7	GGRM	Gudang Garam Tbk
8	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
9	RMBA	Bentoel International Investama Tbk
10	KAEF	Kimia Farma Tbk
11	KLBF	Kalbe Farma Tbk
12	MERK	Merck Tbk
13	UNVR	Unilever Indonesia Tbk

Sumber: Data sekunder diolah, (2017)

Sampel tersebut dipilih karena memenuhi semua kriteria yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis penelitian. Berikut ini akan disajikan profil singkat dari perusahaan industri barang konsumsi yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 4.3.
Pofil Perusahaan

No.	Kode	Perusahaan	Tahun Listing	Bidang
1	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (1990)	1997	Pengolahan makanan, beras, dan kelapa sawit.
2	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (1982)	1990	Produsen produk konsumen seperti mi instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, serta minuman. Selain itu, ICBP juga menjalankan kegiatan usaha kemasan yang memproduksi baik kemasan fleksibel maupun karton, untuk mendukung kegiatan usaha intinya.
3	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk (1990)	1994	Industri makanan olahan, bumbu penyedap, minuman ringan, kemasan, minyak goreng, penggilingan biji gandum dan tekstil pembuatan karung terigu.
4	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk (1929)	1981	Produk-produk bebas alkohol untuk konsumen.
5	MYOR	Mayora Indah Tbk (1977)	1990	Merupakan perusahaan dibidang makanan, seperti biskuit, permen, wafer, cokelat, makanan kesehatan dan juga kopi.
6	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk (1971)	1990	Susu segar, dan kunyit asam.
7	GGRM	Gudang Garam Tbk (1958)	1990	Produsen rokok kretek.
8	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (1905)	1990	Produsen rokok kretek.
9	RMBA	Bentoel International Investama Tbk (1970)	1990	Produsen rokok kretek.
10	KAEF	Kimia Farma Tbk (1969)	2001	Barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi khususnya bidang industri kimia, farmasi, biologi, kesehatan, industri makanan serta minuman.
11	KLBF	Kalbe Farma Tbk (1966)	1991	Bidang farmasi, perdagangan dan perwakilan. Saat ini, KLBF terutama bergerak dalam bidang pengembangan, pembuatan dan perdagangan persediaan farmasi termasuk obat dan produk konsumsi kesehatan.

Lanjutan Tabel 4.3.
Pofil Perusahaan

12	MERK	Merck Tbk (1970)	1981	Obat- obatan.
13	UNVR	Unilever Indonesia Tbk (1933)	1982	Produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi, termasuk didalamnya sabun, deterjen, margarin, es krim, es krim, bumbu-bumbu masak, kecap, produk-produk kosmetika, minuman dengan bahan pokok teh dan minuman sari buah.

Sumber: Data sekunder diolah, (2017)

Perusahaan-perusahaan diatas merupakan perusahaan dengan nilai laba positif, yang menandakan bahwa nilai penjualan perusahaannya tinggi. Selain itu, jika perusahaan mempunyai laba yang tinggi pasti hutang yang dimiliki juga ikut tinggi, nah hal tersebut yang bisa mempengaruhi jumlah pembayaran pajak suatu perusahaan. Untuk itu, beberapa perusahaan memilih untuk melakukan penghindaran pajak. Agar tidak buruk dimata masyarakat karena melakukan penghindaran pajak, maka perusahaan harus memperhatikan aspek lain agar tercipta kondisi sinergis antara perusahaan dan masyarakat yang akan membawa perusahaan kearah perbaikan serta peningkatan taraf hidup masyarakat. (Susilohadi, 2008)

Secara ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan keuntungan. Dan juga secara sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan laba perusahaan, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Kondisi yang seperti itu tentunya akan membuat perusahaan lebih seimbang dan terlihat baik dimata masyarakat, hal itu

biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan.

4.1.2. Hasil Analisis Deskriptif

Hasil tabulasi data untuk variabel dependen dan independen disajikan pada lampiran. Statistik deskriptif masing-masing variabel disajikan dalam Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Median	Std Deviasi
ROA	12.110	31.260	18.933	16.870	5.393
DER	0.030	0.570	0.189	0.180	0.143
TAX	-0.150	0.470	0.228	0.250	0.101
CSR	0.420	0.870	0.598	0.520	0.125

Sumber: Data sekunder diolah, (2018)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.4. dapat dijelaskan hasil sebagai berikut:

- (1) Selama kurun waktu tahun 2014-2016 nilai ROA terendah pada 12.110 dan nilai ROA tertinggi pada 31.260. Kemudian rata-rata nilai ROA tahun 2014-2016 sebesar 18.933 dengan standar deviasi sebesar 5.393. Hal ini berarti nilai ROA tahun 2014-2016 memusat diangka 18.933 dengan standar deviasi 5.393.
- (2) Selama kurun waktu tahun 2014-2016 nilai DER terendah pada 0.030 dan nilai DER tertinggi pada 0.570. Kemudian rata-rata nilai DER tahun 2014-2016 sebesar 0.189 dengan standar deviasi sebesar 0.143. Hal ini berarti

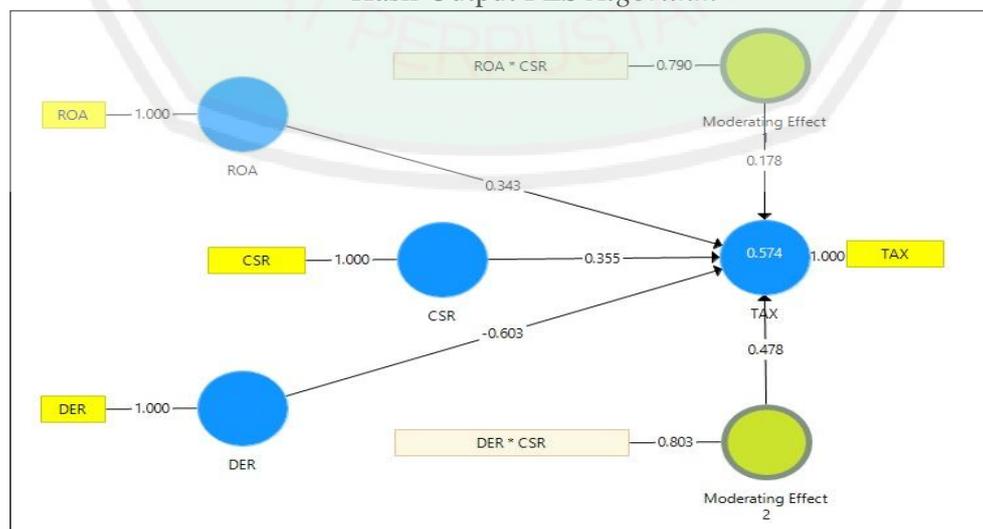
nilai DER tahun 2014-2016 memusat diangka 0.189 dengan standar deviasi 0.143.

- (3) Selama kurun waktu tahun 2014-2016 nilai *TAX* terendah pada -0.150 dan nilai *TAX* tertinggi pada 0.470. Kemudian rata-rata nilai *TAX* tahun 2014-2016 sebesar 0.228 dengan standar deviasi sebesar 0.101. Hal ini berarti nilai *TAX* tahun 2014-2016 memusat diangka 0.228 dengan standar deviasi 0.101.
- (4) Selama kurun waktu tahun 2014-2016 nilai *CSR* terendah pada 0.420 dan nilai *CSR* tertinggi pada 0.870. Kemudian rata-rata nilai *CSR* tahun 2014-2016 sebesar 0.598 dengan standar deviasi sebesar 0.125. Hal ini berarti nilai *CSR* tahun 2014-2016 memusat diangka 0.598 dengan standar deviasi 0.125.

4.1.3. Hasil Analisis Model PLS

4.1.3.1. Diagram jalur (*diagram path*) PLS

Gambar 4.1.
Hasil Output PLS *Algorithm*



Sumber: Data sekunder diolah, (2018)

Terdapat dua tahapan pemodelan dalam *Partial Least Square* (PLS) yakni model struktural dan model pengukuran. Model struktural (*inner model*) adalah model yang fungsinya untuk melihat hubungan antar variabel laten. Sedangkan model pengukuran (*outer model*) fungsinya melihat hubungan antar indikator dengan variabel latennya. Langkah yang harus dilakukan adalah menyusun diagram jalur yang menghubungkan antar model pengukuran dan model struktural di dalam satu diagram. Gambar 4.1. menunjukkan bahwa konstruk laten dalam penelitian merupakan konstruk dengan multidimensi. Konstruk eksogen ROA dan DER merupakan bentuk konstruk reflektif dalam PLS. Sedangkan konstruk endogen *Tax avoidance* merupakan bentuk konstruk formatif.

Pada gambar 4.1. diatas dijelaskan bahwa bentuk bulat dicerminkan sebagai variabel dan bentuk kotak dicerminkan sebagai indikator. Pada penelitian ini, masing masing variabel sama dengan indikatornya. Seperti variabel ROA sama dengan indikatornya yaitu ROA, diikuti dengan DER, CSR dan *Tax avoidance*. Kemudian juga dijelaskan antar hubungan langsung dan tidak langsung. Hubungan langsungnya adalah ROA dengan *Tax avoidance*, DER dengan *Tax avoidance*, dan CSR dengan *Tax avoidance*. Sedangkan hubungan tidak langsungnya adalah CSR memperkuat/memperlemah ROA dengan *Tax avoidance* dan CSR memperkuat/memperlemah DER dengan *Tax avoidance*.

4.1.3.2. Konversi diagram jalur ke sistem persamaan

a. Konversi persamaan model pengukuran (*outer model*)

1) Variabel laten eksogen (γ_1 ROA)

$$ROA = 1,000 \gamma_1 + 0,000$$

Indikator variabel ROA menunjukkan bahwa indikator ROA memiliki nilai 1, artinya indikator tersebut sangat berpengaruh terhadap variabel ROA.

2) Variabel laten eksogen (γ_2 DER)

$$DER = 1,000 \gamma_2 + 0,000$$

Indikator variabel DER menunjukkan bahwa indikator DER memiliki nilai 1, artinya indikator tersebut sangat berpengaruh terhadap variabel DER.

3) Variabel laten moderasi (γ_3 CSR)

$$CSR = 1,000 \gamma_3 + 0,000$$

Indikator variabel CSR menunjukkan bahwa indikator CSR memiliki nilai 1, artinya indikator tersebut sangat berpengaruh terhadap variabel CSR.

4) Variabel *Moderating Effect* (β)

$$\text{Moderating Effect 1} = 0.790 \beta + 0.239$$

$$\text{Moderating Effect 2} = 0.803 \beta + 0.167$$

Komponen indikator variabel moderasi 2 memiliki nilai paling banyak sebesar 0.803, artinya komponen variabel moderasi 2 tersebut sangat berpengaruh terhadap variabel moderasi 2. Sedangkan komponen indikator variabel moderasi 1 memiliki nilai yang lebih rendah sebesar 0.790 artinya komponen variabel moderasi 1 tersebut berpengaruh terhadap variabel moderasi 1.

5) Variabel laten endogen

$$\text{Tax avoidance} = 1,000 Y + 0,000$$

Indikator variabel *Tax avoidance* menunjukkan bahwa indikator *Tax avoidance* memiliki nilai 1, artinya indikator tersebut sangat berpengaruh terhadap variabel *Tax avoidance*.

b. Konversi persamaan model struktural (*inner model*)

Konversi diagram jalur dalam model struktural dimaksudkan untuk mengetahui arah pengaruh positif atau negatif variabel eksogen terhadap variabel endogen sebagaimana model berikut ini:

$$TAX = 0,343 \gamma_1 - 0,603 \gamma_2 + 0,355 \gamma_3 + 0,178 \beta_1 + 0,478 \beta_2 + 0,146$$

Dari model diatas dapat diinformasikan bahwa:

1. Koefisien *direct effect* ROA terhadap *Tax avoidance*.

Sebesar 0.343 menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh positif terhadap *Tax avoidance*. Hal ini berarti semakin tinggi ROA maka dapat menaikkan angka *Tax avoidance*.

2. Koefisien *direct effect* DER terhadap *Tax avoidance*.

Sebesar -0,603 menyatakan bahwa DER memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*. Hal ini berarti semakin tinggi DER maka dapat menurunkan angka *Tax avoidance*.

3. Koefisien *direct effect* CSR terhadap *Tax avoidance*.

Sebesar 0.355 menyatakan bahwa CSR memiliki pengaruh positif terhadap *Tax avoidance*. Hal ini berarti semakin tinggi CSR maka dapat menaikkan *Tax avoidance*.

4. Koefisien *indirect effect* CSR dalam hubungan ROA terhadap *Tax avoidance*.

Sebesar 0,178 menyatakan bahwa CSR memiliki pengaruh positif atau bersifat memperkuat hubungan ROA terhadap *Tax avoidance*. Hal ini berarti saat ROA tinggi dan dengan CSR yang juga tinggi maka dapat menaikkan *Tax avoidance*.

5. Koefisien *indirect effect* CSR dalam hubungan DER terhadap *Tax avoidance*.

Sebesar 0,478 menyatakan bahwa CSR memiliki pengaruh positif atau bersifat memperkuat hubungan DER terhadap *Tax avoidance*. Hal ini berarti ketika DER mengalami kenaikan dan CSR juga mengalami kenaikan maka *Tax avoidance* juga akan ikut naik.

4.1.3.3. Evaluasi kriteria *goodness of fit*

a. Evaluasi Model Pengukuran (*outer model*)

Evaluasi model pengukuran dengan indikator reflektif dievaluasi dengan *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *reliability* untuk blok indikator. Adapun evaluasi model pengukuran dieksekusi dengan menggunakan PLS *Algorithm*.

1) *Convergent validity*

Convergent validity setiap indikator (variabel manifest) dalam mengukur variabel laten ditunjukkan oleh besar kecilnya *loading factor*. Suatu indikator dikatakan valid apabila *loading factor* suatu indikator bernilai positif dan lebih besar 0.5. berikut dapat dilihat nilai *loading factor* pada tabel 4.5.

Tabel 4.5.

Uji Validitas Konvergen dengan *Loading Factor*

Variabel	Indikator	<i>Loading factor</i>	Keterangan
ROA	ROA	1.000	Valid
DER	DER	1.000	Valid
CSR	CSR	1.000	Valid
TAX AVOIDANCE	TAX	1.000	Valid

Sumber: Data sekunder diolah, (2018)

Berdasarkan tabel 4.5. diatas nilai *loading factor* yang dihasilkan dapat diketahui bahwa semua indikator masing-masing variabel baik ROA, DER, CSR dan *Tax avoidance* memiliki nilai *loading factor* yang lebih besar dari 0,5.

Dengan demikian indikator tersebut dapat dinyatakan valid sebagai pengukur variabel latennya.

2) *Discriminant validity*

Discriminant validity setiap variabel dalam mengukur variabel laten ditunjukkan oleh nilai *square root of average variance extracted* ($\sqrt{\text{AVE}}$). Ketentuannya adalah apabila $\sqrt{\text{AVE}}$ variabel variabel laten lebih besar dari korelasi variabel laten mengindikasikan indikator-indikator variabel memiliki *discriminant validity* yang baik. Nilai $\sqrt{\text{AVE}}$ direkomendasikan lebih besar dari 0,5. Berikut dapat dilihat nilai *composite reliability* dan nilai *cronbach's alpha* pada tabel 4.6.

Tabel 4.6.
Uji Validitas Diskriminan dengan AVE

Variabel	AVE	$\sqrt{\text{AVE}}$	Keterangan
ROA	1.000	1.000	Valid
DER	1.000	1.000	Valid
CSR	1.000	1.000	Valid
TAX AVOIDANCE	1.000	1.000	Valid

Sumber: Data sekunder diolah, (2018)

Berdasarkan tabel 4.6. dapat dilihat bahwa nilai akar AVE yang dihasilkan dapat diketahui bahwa semua indikator masing-masing variabel yaitu ROA dan DER memiliki nilai *loading factor* yang lebih besar dari 0,5. Dengan demikian indikator tersebut dapat dinyatakan valid sebagai pengukur variabel latennya.

3) *Composite reliability* dan *Crobach alpha*

Evaluasi *composite reliability* dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* dari blok indikator yang mengukur konstruk dan nilai *cronbach alpha*. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai *composite reliability* di atas 0,7 dan

nilai *cronbach's alpha* disarankan di atas 0,6. Berikut dapat dilihat nilai *composite reliability* dan nilai *cronbach's alpha* pada tabel 4.7.

Tabel 4.7.
Uji Reliabilitas dengan *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*

Variabel	<i>Composite reliability</i>	<i>Cronbach alpha</i>	Keterangan
ROA	1.000	1.000	Reliabel
DER	1.000	1.000	Reliabel
CSR	1.000	1.000	Reliabel
<i>TAX AVOIDANCE</i>	1.000	1.000	Reliabel

Sumber: Data sekunder diolah, (2018)

Berdasarkan tabel 4.7. dapat dilihat bahwa nilai *composite reliability* pada keempat variabel laten berada di atas 0,7 dan hasil evaluasi *cronbach alpha* di atas 0,6. Hal tersebut menunjukkan reabilitas alat ukur yang tinggi, yakni pengukur dari masing-masing konstruk berkorelasi tinggi.

b. Evaluasi Model Struktural (*inner model*)

Setelah dilakukan pengujian terhadap *outer model* dengan uji validitas dan reliabilitas, yang mana model yang sudah diestimasi menunjukkan tingkat validitas dan reliabilitas yang baik, maka selanjutnya dilakukan pengujian terhadap model struktural (*inner model*). Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-Squares (R^2) yang merupakan uji *goodness of fit* model untuk setiap variabel sebagai kekuatan prediksi dari model struktural.

Tabel 4.8.
Hasil Evaluasi Model Struktural dengan R Square

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Error (STDEV)</i>	<i>T Statistik (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
TAX	0.574	0.613	0.146	3.935	0.000

Sumber: Data sekunder diolah, (2018)

Berdasarkan tabel 4.8. hasil pengujian menunjukkan nilai R^2 untuk variabel *Tax avoidance* sebesar 0,574 atau 57%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa keragaman variabel *Tax avoidance* mampu dijelaskan oleh variabel ROA, DER, dan CSR sebesar 57% sedangkan sisanya yaitu sebesar 43% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini. Variabel lain seperti ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, transparansi perusahaan, nilai perusahaan, dll. (Dewi & Jati, 2014 dan Ngadiman & Christiany, 2014)

4.1.4. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji hubungan kausalitas yang dikembangkan dalam model yaitu pengaruh variabel eksogen dan variabel moderasi terhadap variabel endogen. Pengujian hipotesis dapat diketahui melalui T statistik pada tabel berikut:

Tabel. 4.9.
Pengujian Hipotesis

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standar Deviasi (STDEV)</i>	<i>T Statistik (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
ROA -> TAX	0.343	0.343	0.173	1.980	0.048
DER -> TAX	-0.603	-0.567	0.165	3.653	0.000
CSR -> TAX	0.355	0.362	0.146	2.440	0.015
MODERATING EFFECT 1 -> TAX	0.178	0.217	0.223	0.799	0.424
MODERATING EFFECT 2 -> TAX	0.478	0.437	0.163	2.942	0.003

Sumber: Data sekunder diolah, (2018)

Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila nilai T-Statistik lebih besar dari nilai kritis (t-tabel) maka dinyatakan adanya pengaruh antara variabel eksogen terhadap variabel endogen pada masing-masing hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.

(1) Pengujian hipotesis pertama (H1)

Hipotesis pertama menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian menunjukkan variabel ROA memiliki nilai T-statistik sebesar 1.980 dan *p-value* 0.048, sedangkan nilai kritis (t tabel) sebesar 1,96 dan nilai *p-value* kurang dari 0,05 atau 5%. Dan hasil sampel aslinya sebesar 0.343. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai T-statistik > nilai kritis (t-tabel) dan *p-value* < 0,05 dan sampel asli bernilai positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel ROA secara langsung berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *tax avoidance* atau dengan kata lain H1 diterima. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi ROA maka semakin naik tingkat *tax avoidance*.

(2) Pengujian hipotesis kedua (H2)

Hipotesis kedua menyatakan bahwa DER berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian menunjukkan variabel DER memiliki nilai T-statistik sebesar 3.653 dan *p-value* 0,000, sedangkan nilai kritis (t tabel) sebesar 1,96 dan nilai *p-value* kurang dari 0,05 atau 5%. Dan hasil sampel aslinya sebesar -0.603. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai T-statistik > nilai kritis (t-tabel) dan *p-value* < 0,05 dan sampel asli bernilai negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel DER secara langsung memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *tax avoidance* atau dengan kata lain H2 diterima. Hal ini berarti semakin tinggi DER maka semakin menurun tingkat *tax avoidance*.

(3) Pengujian hipotesis ketiga (H3) → *Moderating effect* 1

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa CSR memperkuat pengaruh ROA terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian menunjukkan variabel efek moderasi 1

memiliki nilai T-statistik sebesar 0.799 dan *p-value* 0,424, sedangkan nilai kritis (t tabel) sebesar 1,96 dan nilai *p-value* kurang dari 0,05 atau 5%. Dan hasil sampel aslinya sebesar 0.178. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai T-statistik < nilai kritis (t-tabel) dan *p-value* > 0,05 dan sampel asli bernilai positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel CSR secara langsung memperlemah pengaruh ROA terhadap *tax avoidance* atau dengan kata lain H3 ditolak.

(4) Pengujian hipotesis keempat (H4) → *Moderating effect 2*

Hipotesis keempat menyatakan bahwa CSR memperkuat pengaruh DER terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian menunjukkan variabel efek moderasi 2 memiliki nilai T-statistik sebesar 2.942 dan *p-value* 0,003, sedangkan nilai kritis (t tabel) sebesar 1,96 dan nilai *p-value* kurang dari 0,05 atau 5%. Dan hasil sampel aslinya sebesar 0.478. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai T-statistik > nilai kritis (t-tabel) dan *p-value* < 0,05 dan sampel asli bernilai positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel CSR memperkuat pengaruh DER terhadap *tax avoidance* atau dengan kata lain H4 diterima.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Pengujian hipotesis pertama merumuskan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel Profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Dari hasil pengujian terbukti bahwa terdapat pengaruh signifikan positif variabel Profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menerima hipotesis pertama yang menduga bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel Profitabilitas terhadap *tax avoidance* tahun

2014-2016. Dengan kata lain ROA yang tinggi akan memberikan dampak pada kenaikan tingkat *tax avoidance*.

Penelitian ini mendukung penelitian Adiyani dan Septanta (2014) serta sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Valentinus (2015) bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak. ROA secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Putra dan Putri (2017) yang menyatakan secara parsial bahwa ROA berpengaruh signifikan negatif pada penghindaran pajak di BEI. Hal serupa juga terjadi pada penelitian yang diteliti oleh Winoto dan Indarti (2015) serta Kurniasih dan Sari (2013) bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

ROA dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Semakin besar ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Adanya teori agensi akan memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. *Agent* dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent* sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak.

Pecking order theory menjelaskan bahwa pendanaan dari modal internal merupakan pendanaan yang paling disukai perusahaan, oleh karena itu *agent* akan memaksimalkan pengelolaan aset internal yang dimilikinya. Pengaruh ROA positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan sampel mampu

mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak.

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1b menjelaskan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta tetap berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tetap tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan.

Dyrenge (2008) dalam penelitiannya membuktikan bahwa pembayaran pajak tingkat menengah dan tingkat tinggi mengakibatkan ROA menjadi rendah, hal ini dikarenakan ROA dipengaruhi oleh pengeluaran yang besar dalam melakukan penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan untuk pengembangan usaha.

Berdasarkan pemahaman yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perusahaan sampel menganut *pecking order theory*, dimana perusahaan lebih memilih pendanaan internal dan memperoleh insentif dari pengelolaan aset yang dapat mengurangi beban pajak. Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh *agent* untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent*, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

Teori biaya politik menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah. Teori kekuasaan politik memberikan arti yang berlawanan, yakni perusahaan besar akan lebih agresif untuk melakukan penghindaran pajak agar mencapai penghematan beban pajak yang optimal. (Watt & Zimmerman, 1986)

Koefisien jalur yang bernilai positif menunjukkan bahwa makin besar perusahaan, makin besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk mengelola beban pajaknya. Hasil dalam penelitian ini juga didukung dengan teori kekuasaan politik yang menjelaskan bahwa perusahaan yang besar akan memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik yang dikehendaki dan menguntungkan perusahaan termasuk untuk melakukan penghindaran pajak agar mencapai penghematan pajak yang optimal.

Perusahaan yang memiliki nilai ROA tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax avoidance* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Apabila ROA tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya dari perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. (Adiyani dan Septanta, 2014)

Berikut ini adalah ayat mengenai Profitabilitas terhadap penghindaran pajak:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya:

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan masih ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS At-Taubah: 41)

Shihab (2007) menyebutkan wahai orang-orang Mukmin, apabila datang seruan untuk berjihad, sambutlah seruan itu, baik secara pribadi maupun kelompok sesuai dengan keadaan masing-masing dengan semangat tempur dan kekuatan senjata. Berjihadlah dengan harta dan jiwa untuk meninggikan agama Allah, karena dalam berjihad terdapat kekuatan dan kebaikan bagi kalian, apabila kalian mengetahuinya dengan baik dan benar. Di antara makna yang dimaksudkan di sini adalah “Pergilah untuk berperang dengan berkendaraan atau berjalan kaki, dengan peralatan perang yang ringan maupun berat.” Hal ini termasuk dalam taktik perang yang telah dikenal pada saat ini, di mana senjata- senjata ringan seperti pedang, digunakan untuk berperang dengan tentara, sedang senjata-senjata berat digunakan untuk menghancurkan benteng-benteng pertahanan musuh.

Sama halnya dengan konsep atau taktik memperoleh nilai perusahaan di mata konsumen salah satu caranya dengan tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Laba yang tinggi atau nilai ROA yang tinggi seharusnya bisa digunakan untuk berjihad untuk negara maupun untuk umat, yaitu dengan membayar pajak yang baik dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pembayaran

pajak, sehingga perusahaan bisa lebih *sustainable* dan baik di mata masyarakat, *shareholder* maupun *stakeholder*.

4.2.2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Pengujian hipotesis kedua merumuskan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari variabel *leverage* terhadap penghindaran pajak. Dari hasil pengujian terbukti bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif variabel *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menerima hipotesis kedua yang menduga bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari variabel *leverage* terhadap penghindaran pajak tahun 2014-2016. Dengan kata lain *leverage* yang tinggi akan memberikan dampak pada penurunan tingkat penghindaran pajak.

Penelitian ini mendukung penelitian Kuniasih dan Sari (2013) bahwa DER tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Annisa (2017) yang mengatakan bahwa DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Marfu'ah (2015), Suyanto dan Suparmono (2012) memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Perusahaan yang memiliki nilai rasio DER yang tinggi menunjukkan semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya laba yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Rasio DER ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang, akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga seperti pernyataan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan untuk menekan beban pajaknya. (Kasmir, 2013)

DER merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Apabila perusahaan menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Teori *trade off* menyatakan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Koefisien jalur yang bernilai negatif memiliki arti setiap perusahaan mengalami kenaikan DER, maka penghindaran pajak perusahaan akan turun. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan dengan teori *trade off* dan hasil penelitian yang diperoleh Adelina (2012). Keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif, hal tersebut dikarenakan ada peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan (Gupta dan Newberry, 1997).

Keputusan pendanaan yang dimaksud adalah perusahaan lebih menggunakan pendanaan internal atau eksternal. Utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sedangkan dividen yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba kena pajak. Perusahaan sampel memiliki utang yang sebagian besar berasal dari pinjaman modal kepada pemegang saham atau pihak yang berelasi, sehingga pada beban bunga yang ditimbulkan tidak dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga/ kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan.

Berikut ini ayat tentang hubungan *Leverage* terhadap penghindaran pajak:

يُنَادُوهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ
وَعَرَّيْتُمْ الْأُمَانِيَّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَرَّيْتُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ

Artinya:

"Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang mukmin) seraya berkata: "Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kalian?" Mereka (orang-orang mukmin menjawab: "Iya Benar, tetapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri dan kalian menunggu dan kalian ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah; dan kalian telah ditipu terhadap Allah oleh (setan) yang amat penipu." (QS. Al Hadid: 14)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa menunda-nunda amal merupakan tipuan iblis. Karena dalam hal ini melakukan penundaan pembayaran pajak berarti juga menunda untuk melakukan kegiatan partisipasi yang nantinya berguna untuk kepentingan masyarakat (Shihab, 2009). Konsep ini tentunya serupa dengan konsep berzakat yaitu sama-sama untuk kepentingan umat, hanya

saja bedanya terletak pada kepada siapa kewajiban itu dilakukan. Jadi daripada menghindari pajak dengan berhutang, lebih baik membayar sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. Sbaik-baik perusahaan adalah yang mempunyai aset lebih banyak daripada mempunyai hutang yang banyak, untuk itu lebih baik jangan berhutang/menunda-nunda pembayaran pajak. karena konsep penghindaran pajak disini bisa juga diartikan menunda pembayaran pajak, menunda disini berarti berhutang kepada pemerintah, lalu ada denda karena keterlambatan pembayaran pajak itu.

4.2.3. Pengaruh CSR dalam Memperkuat Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Pengujian hipotesis ketiga merumuskan bahwa CSR memperlemah antara variabel profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Dari hasil pengujian terbukti bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan dan memperlemah variabel profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menolak hipotesis ketiga yang menduga bahwa CSR memperkuat antara variabel profitabilitas terhadap penghindaran pajak tahun 2014-2016.

Bila kita amati lebih jauh lagi, hubungan CSR dan penghindaran pajak dapat dijelaskan dengan Teori *Slack Resources*. Perusahaan dengan kualitas CSR yang baik memberikan sinyal bahwa perusahaan tersebut kaya (Susanto, 2009). Perusahaan yang kaya memiliki cukup banyak sumber daya sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban terkait CSR dan pembayaran pajak dengan mudah. Ini didukung penelitian Campbell (2007) menyatakan pada saat kinerja laba perusahaan tinggi, maka perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dalam bentuk program CSR yang lebih baik atau pembayaran pajak yang lebih tinggi.

Mereka juga dapat melakukan aktivitas CSR secara berkelanjutan dan terencana tanpa terkendala keuangan. Di sisi lain mereka tetap dapat memenuhi kewajiban dalam membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Apabila kinerja perusahaan mengalami penurunan, Camphell (2007) menyebutkan jika sumber daya sangat terbatas, perusahaan akan mengalokasikan jumlah yang terbatas bagi CSR dan pajak.

Banyak pemahaman terkait pengertian penghindaran pajak. Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai kegiatan yang mengurangi pajak eksplisit terhadap laba akuntansi sebelum pajak. Aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan.

Penghindaran pajak adalah bagian dari perencanaan pajak perusahaan dalam bentuk pengurangan pajak yang dilakukan secara eksplisit dengan cara apapun. Lietz (2013) membagi strategi perencanaan pajak perusahaan menjadi *perfectly legal*, *grey area*, and *clearly illegal*. Penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah segala upaya pengurangan pajak, baik secara legal maupun ilegal. Karena segala bentuk penghindaran pajak merupakan suatu hal yang tidak beretika dan tidak bertanggung jawab secara sosial, atau dengan kata lain tidak memenuhi konsep *ethical responsibility*, yang mana merupakan salah satu pilar dalam konsep CSR.

Perusahaan dengan kualitas CSR yang baik dan laba yang tinggi akan melakukan pengungkapan laporan pertanggungjawabannya. Selain itu, semakin kecil kemungkinan melakukan penghindaran pajak, dikarenakan segala sesuatu

tentang perusahaan menjadi lebih transparan. Lalu kecil kemungkinan melakukan penghindaran pajak karena memiliki sumber daya yang melimpah dan perusahaan lebih mampu melakukan aktivitas CSR dan pembayaran pajak secara bertanggung jawab. Ini sesuai dengan teori *slack resource* dimana dalam teori ini disebutkan bahwa selain mempunyai kinerja yang baik, perusahaan harus juga melakukan kontribusi sosial. Untuk itu dalam melakukan kinerja sosial dibutuhkan uang yang berlebih sehingga dapat dipastikan perusahaan di sektor yang diteliti ini merupakan perusahaan yang baik dari segi pengeluaran uangnya. Jadi perusahaan yang memperoleh laba tinggi cenderung mempunyai kebiasaan melakukan CSR dengan baik pula. Sehingga dalam penelitian benar adanya apabila perusahaan di sektor ini tidak melakukan penghindaran pajak, dikarenakan pengungkapan CSR perusahaannya sangat baik. Karena alasan itulah, jikalau melakukan penghindaran pajak, pastinya citra perusahaan dimata publik akan menurun. Menurut Hoi, Wu, Zhang (2013) *irresponsible CSR* didominasi oleh perusahaan dengan kinerja laba rendah, sedangkan perusahaan dengan kinerja laba tinggi lebih berkomitmen dan memiliki program CSR jangka panjang serta melaporkan laporan pertanggungjawabannya, sehingga kecil kemungkinan melakukan penghindaran pajak.

Hasil ini juga didukung Watson (2014) yang menemukan bahwa perusahaan dengan kualitas CSR yang baik tidak melakukan penghindaran pajak pada kondisi kinerja laba tinggi apalagi akan ada laporan pertanggungjawaban yang akan membuat perusahaan menjadi lebih transparan. Sehingga hal itu sesuai dengan penelitian ini, dimana perusahaan di sektor industri barang konsumsi

memang rata-rata memiliki laba penjualan yang tinggi, tentunya cenderung akan melakukan penghindaran pajak. Namun karena adanya kualitas CSR yang baik beserta aturan pengungkapan CSR, maka perusahaan yang mempunyai laba tinggi akan tetap melaksanakan kewajiban usahanya secara bersama-sama dalam bentuk CSR maupun pembayaran pajak. Oleh karena itu, CSR sebagai pemoderasi tidak mempengaruhi ROA terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang mendukung moderasi CSR antara ROA dengan penghindaran pajak belum ada melainkan pengaruh CSR dan ROA terhadap penghindaran pajak sudah ada, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Agusti (2014) yang menyatakan bahwa ada pengaruh secara simultan maupun parsial variabel CSR dan ROA terhadap penghindaran pajak.

Berikut ini ayat tentang hubungan CSR memperlemah profitabilitas terhadap penghindaran pajak:

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ
 اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

Artinya:

“Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.” (QS. Ibrahim: 27)

Tafsir Shihab (2007) menyatakan bahwa Allah mengokohkan orang-orang Mukmin di atas kata kebenaran di dunia dan akhirat, dan menjauhkan orang-orang kafir dari situ karena jeleknya persiapan mereka. Allah mengokohkan sebagian orang dan menyesatkan yang lain menurut kehendak-Nya. Tak ada yang dapat menyanggah dan menghalangi keputusan-Nya.

Dijelaskan dari ayat tersebut bahwa orang yang bersikap semaunya dan tidak jujur maka ia akan menjadi orang yang sesat. Sama halnya dengan kasus penghindaran pajak ini, dimana perusahaan berusaha menghindari pajak dengan berbagai cara, misalnya melakukan pencatatan keuangan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga dengan adanya penfungkapan CSR dapat membantu perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama, seperti berbohong dan bersikap tidak jujur. Karena kita sendiri tahu, bahwa salah satu prinsip CSR adalah adanya transparansi informasi yang nantinya berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi dan perusahaan bisa bertanggungjawab secara penuh pada masyarakat dan lingkungan.

4.2.4. Pengaruh CSR dalam Memperkuat *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Pengujian hipotesis keempat merumuskan bahwa CSR memperkuat antara variabel *leverage* terhadap penghindaran pajak. Dari hasil pengujian terbukti bahwa CSR berpengaruh signifikan dan memperkuat variabel *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menerima hipotesis keempat yang menduga bahwa CSR memperkuat antara variabel *leverage* terhadap penghindaran pajak tahun 2014-2016.

Penelitian yang mendukung moderasi CSR antara DER dengan penghindaran pajak belum ada melainkan pengaruh CSR dan DER terhadap penghindaran pajak ada seperti penelitian yang diteliti oleh Agusti (2014) yang menyatakan bahwa ada pengaruh secara simultan dan parsial variabel CSR dan DER terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah sebagai salah satu subjek pajak. Membayar pajak merupakan sebuah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Dengan membayar pajak, berarti perusahaan mendukung dan memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan infrastruktur dan aset publik yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan mensejahterakan rakyat. Hal ini berarti perusahaan berkontribusi dalam upaya mensejahterakan rakyat. Dowling dan Pfefer (1975) menyatakan bahwa dalam teori legitimasi perusahaan selalu berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai perusahaan dengan norma-norma sosial di lingkungan sosial sekitar, dimana perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Perusahaan selalu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa kegiatannya sesuai dengan norma-norma sosial yang ada untuk mendapatkan legitimasi agar kegiatannya dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Salah satu usaha untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat adalah dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa melakukan aktivitas penghindaran pajak yang bisa merugikan banyak pihak.

Dengan membayar pajak dengan penuh kesadaran dan sesuai dengan nominal yang ditetapkan, perusahaan juga telah membina hubungan yang baik dengan pemerintah. Hal ini sejalan dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan beraktivitas tidak hanya untuk kepentingannya sendiri, melainkan juga untuk kepentingan semua pihak atau *stakeholder* yang terkena dampak atas kegiatan perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007). Berdasarkan teori

stakeholder, perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemegang sahamnya saja, perusahaan juga memiliki tanggung jawab kepada semua *stakeholdernya* seperti *supplier*, pemerintah, pekerja, masyarakat, konsumen, dan pihak-pihak lain yang terkena dampak kegiatan perusahaan. Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholdernya* adalah dengan membina hubungan baik dengan pemerintah. Hal ini bisa dilakukan melalui ketaatan perusahaan dalam membayar pajak dan tidak melakukan aktivitas penghindaran pajak.

Freedman (2003) mengatakan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak berarti perusahaan tersebut tidak membayar kewajibannya berupa beban pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah untuk membantu pendanaan barang publik didalam masyarakat. Menurut Lanis dan Richardson (2012) perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan memperburuk reputasinya dimata para *stakeholder*. Tidak hanya itu, dampak terburuk dari penghindaran pajak adalah akan menghasilkan berhentinya kegiatan operasi perusahaan.

CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada semua *stakeholdernya*. Dan pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada *stakeholdernya* melalui pemerintah. Dengan demikian, perusahaan yang terlibat penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial (Lanis dan Richardson, 2012). Sehingga keputusan perusahaan untuk mengurangi tingkat pajaknya atau melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh sikapnya terhadap CSR. Dalam penelitian terdahulu yang

dilakukan Lanis dan Richardson (2012) dan Yoehana (2013) menemukan bahwa CSR Berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil dari penelitian terdahulu, maka seharusnya semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, maka diharapkan akan semakin rendah tingkat perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini karena tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial.

Berikut ini ayat tentang hubungan CSR memperkuat *Leverage* terhadap penghindaran pajak:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ
ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

Artinya:

“dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa (QS. Al-An’aam: 153)

Shihab (2009) menyebutkan bahwa, “Terakhir, kesepuluh, jangan kalian keluar dari ketentuan yang telah Aku gariskan. Sebab, ketentuan- ketentuan itu adalah jalan yang lurus yang akan mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ikutilah jalan itu dan jangan sekali-kali mengikuti jalan lain yang tidak benar, yang telah dilarang Allah, agar kalian tidak terpecah menjadi kelompok-kelompok dan golongan-golongan, dan tidak menjauh dari jalan Allah yang lurus. Allah menegaskan perintah menjauhi larangan itu, agar kalian tidak sekali-kali melanggarnya.”.

Jadi berhutang dalam muamalah dihalalkan dalam islam, hanya saja harus ada perinciannya yang jelas tentang hutang itu, agar pengembalian hutang menjadi lebih mudah. Dalam hal ini, dengan pelaporan pertanggungjawaban sosial perusahaan tentunya akan menggambarkan dengan jelas tentang keuangan perusahaan, sehingga ketika laporan keuangan diungkapkan pada publik, perusahaan tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat islam. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang dipublikasikan menandakan bahwa hal itu bersifat transparan.

Konsep akuntabilitas sosial sendiri menurut islam terkait dengan prinsip *full disclosure*, yang mana penyedia laporan keuangan harus mengungkapkan segala sesuatu yang dinilai penting bagi *stakeholder*. Pengungkapan CSR itu sendiri nantinya akan berdampak baik bagi semua pihak, karena bisnis tersebut dikelola dengan baik sesuai aturan islam dan tidak ada unsur kebohongan atau kesesatan. Sehingga dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengungkapan CSR, maka memperkuat pengaruh antara DER terhadap penghindaran pajak. Dan dalam islam, sangat menjunjung segala sesuatu yang bersifat jujur, berada di jalan yang tepat, dan menjauhi segala larangan Allah SWT, dalam hal ini berupa penghindaran pajak yang merugikan masyarakat dan pemerintah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pengujian hipotesis pertama merumuskan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Dari hasil pengujian terbukti bahwa terdapat pengaruh signifikan positif variabel profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menerima hipotesis pertama yang menduga bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel profitabilitas terhadap *tax avoidance* tahun 2014-2016. Dengan kata lain profitabilitas yang tinggi akan memberikan dampak pada kenaikan tingkat *tax avoidance*.
2. Pengujian hipotesis kedua merumuskan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari variabel *leverage* terhadap penghindaran pajak. Dari hasil pengujian terbukti bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif variabel *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menerima hipotesis kedua yang menduga bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari variabel *leverage* terhadap penghindaran pajak tahun 2014-2016. Dengan kata lain *leverage* yang tinggi akan memberikan dampak pada penurunan tingkat penghindaran pajak.
3. Pengujian hipotesis ketiga merumuskan bahwa CSR memperlemah antara variabel profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Dari hasil pengujian

terbukti bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan dan memperlemah variabel profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menolak hipotesis ketiga yang menduga bahwa CSR memperkuat antara variabel profitabilitas terhadap penghindaran pajak tahun 2014-2016.

4. Pengujian hipotesis keempat merumuskan bahwa CSR memperkuat antara variabel *leverage* terhadap penghindaran pajak. Dari hasil pengujian terbukti bahwa CSR berpengaruh signifikan dan memperkuat variabel *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menerima hipotesis keempat yang menduga bahwa CSR memperkuat antara variabel *leverage* terhadap penghindaran pajak tahun 2014-2016.

5.2. Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menambah variabel independen dan variabel dependen yang terkait yang belum terdapat dalam penelitian ini.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran selain *ETR* (*effective tax rate*) dalam mengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena pengukuran penghindaran pajak sangat beragam bukan hanya *ETR*.
3. Sebaiknya memperluas sampel penelitian diluar sektor industri barang konsumsi. Perluasan perusahaan sampel dapat menunjukkan hasil yang berbeda dan semakin akurat. Selain itu juga perlu ditambah tahun penelitian, agar data lebih valid dan reliabel.

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mencari lebih banyak teori terkait dengan penghindaran pajak. Karena merupakan sesuatu yang bersifat ilegal, penulis penelitian ini kesulitan untuk mencari sumber referensi teori terkait penghindaran pajak tersebut.
5. Bagi investor sebaiknya dalam pengambilan keputusan investasi untuk mengkaji terlebih dahulu bagaimana kinerja suatu perusahaan dan tetap mematuhi peraturan tentang perpajakan, penghindaran pajak bukan hal yang wajar tetapi selalu dilakukan. Penghindaran Pajak akan memberikan dampak yang kurang baik untuk kedua belah pihak yang bersangkutan baik dari pihak investor, perusahaan maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Adelina, T. 2012. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Depok.
- Adiyani, Novita dan Septanta, Rananda. 2014. *Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak dengan CSR sebagai Variabel intervening (studi empiris pada perusahaan property and real estate yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010-2014)*. Jurnal. Universitas Pamulang: Jakarta.
- Agusti, Wirna Yola. 2014. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Padang: Padang.
- Anderson, R. C. dan Reeb, D. M. 2003. *Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500*. Journal of Finance.
- Ang, Robert. 2007. *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia (The Intelligent Guide To Indonesian Capital Market)*. Edisi Pertama. Mediasoft Indonesia: Jakarta.
- Anggraeni, D.S. 2011. *Analisis Keuangan*. Bogor Publishing: Bogor.
- Annisa. 2017. *Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2015)*. Jurnal. Universitas Negeri Riau: Pekanbaru.
- Anonymous. 2016. CIA The World Factbook, China (online), <https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook//geos/ch.html> [diakses 14 Oktober 2017]
- Azwar, Saifuddin. 2011. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. *Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Simposium Nasional Akuntansi XV.
- Brigham, Eugene F dan Houston. 2006. *Fundamental of Financial Management: Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 10. Salemba Empat: Jakarta.
- Calvin, Swingly dan Sukartha, I Made. 2015. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth Pada Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana: Bali.
- Campbell, N. A. and J. B. Reece. 2007. *Tax Avoidance*. Sixth Edition, Pearson Education. Inc. San Francisco. 802-831.
- Clarke. 1998. *Legitimacy Theory on Company*. London, 954-955
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. 2014. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak*. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana: Bali.
- Dewanggono, H. K. Ratih. 2011. *Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan terhadap Harga Saham*. Skripsi Fakultas Ekonomi. UNNES: Semarang.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan Jati, I Ketut. 2014. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola yang Baik Pada Tax*

- Avoidance di Bursa Efek Indonesia*. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana: Bali.
- Dowling, J. dan Pfeffer, J. 1975, Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behaviour. *Pacific Sociological Review*, Vol. 18 (1), pp 122-136.
- Dyrenge, Hanlon. 2008. *The Effects of Managers on Corporate Tax Avoidance*. Journal of University of North Carolina: Amerika.
- Elkington, John. 1997. *Cannibals with forks, the triple bottom line of twentieth century business*, dalam Teguh Sri Pembudi. 2005. *CSR. Sebuah Keharusan dalam Investasi Sosial*. Jakarta: Pusat Penyuluhan Sosial (PUSENSOS) Departemen Sosial RI.
- Global Reporting Inisiatives (GRI). 2013. *G4 Pedoman Pelaporan Keberlanjutan*. GRI Institute.
- Gupta, S., Newberry, K. 1997. Determinants of Variability in Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Longitudinal Data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16 (1), 1-34.
- Hadianto, M. L. 2013. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan CSR dan GCG Sebagai Variabel Pemoderasi*. Skripsi. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Hadhiri, Choiruddin. 2010. *Klasifikasi Kandungan al-Qur'an*. Gema Insani Press: Jakarta.
- Hanlon, Michelle dan Heitzman, Shane. 2010. *A Review Of Tax Research*. Journal of Accounting and Economics.
- Harnanto. 2013. *Perencanaan Pajak*. Edisi Pertama. BPFE: Yogyakarta.
- Harrington, Christine and Smith, Walter. 2012. *Tax Avoidance and Corporate Capital Structure*. Journal Of Finance & Accountancy.
- Hery, Purwanto. 2015. *Manajemen Keuangan*. Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu: Jakarta.
- Hoi, Chun-Keung., Wu, Qiang., Zhang, Hao. 2013. *Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated with Tax Avoidance? Evidence from Irresponsible CSR Activities*. The Accounting Review.
- Husnan, Suad., Pudjiastuti, Enny. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Irmin, Soejitno. 2005. *Kepemimpinan Melalui Asmaul Husna*. Batavia Press: Jakarta.
- Jensen, M. C. and W. H. Meckling. 2012. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics.
- Kasmir. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kasmir, 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Kurniasih, Tommy dan Sari, Maria M. Ratna. 2013. *Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi fiscal Pada Tax Avoidance*. Buletin Studi Ekonomi.

- Lanis, R dan Richardson, G. 2012. *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: an Empirical Analysis*. Journal of Accounting and Public Policy.
- Lietz, C. A. 2013. *Handbook of family resilience*. Springer Science Business Media: New York.
- LPEM Universitas Indonesia bekerjasama dengan Clean Urban,RTI. 2009. *Laporan Studi dampak krisis Ekonomi Terhadap Keuangan daerah di Indonesia*: Jakarta.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Ketut Alit Suardana. 2014. *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur*. E-jurnal Akuntansi. Universitas Udayana: Bali.
- Marfu'ah, Laila. 2015. *Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah: Surakarta.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Ngadiman dan Christiany, Puspitasari. 2014. *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012*. Jurnal Akuntansi. Universitas Tarumanegara.
- Noor, Juliansyah. 2010. *Metodologi Penelitian:Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Kencana: Jakarta.
- Oktavia dan Martani, Dwi. 2013. *Tingkat Pengungkapan dan Penggunaan Derivatif Keuangan dalam Aktivitas Penghindaran Pajak*. Jurnal Akuntansi Keuangan Indonesia.
- Octaviana, Natasya Elma dan Rohman, Abdul. 2014. *Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility: Untuk Menguji Teori Legitimasi*. Journal of Accounting.
- Othman dan Thani. 2010. "Islamic Social Reporting Of Listed Companies In Malaysia". International Business & Economics Research Journal. University Teknologi MARA: Malaysia.
- Pohan, Chairil. A. 2013. *Manajemen Perpajakan*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Prasiwi, Kristantina Wahyu. 2015. *Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan : Transparansi Informasi SEbagai Variable Pemoderansi*. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Putra, Bella Irwansyah dan Putri, Vidiyanna Rizal. 2017. *Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance*. Jurnal. STIE Indonesia Banking School: Jakarta.
- Ramadhani, Laras Surya. 2012. "Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI". Jurnal Akuntansi dan Auditing, UNDIP: Semarang.
- Resmi. Siti, 2013. *Perpajakan teori dan kasus Edisi 7*. Salemba Empat: Jakarta.

- Reza, Faisal. 2012. *“Pengaruh Dewan Komisaris Dan Komite Auditter terhadap Penghindaran Pajak”*. Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Rianto, Bambang. 2013. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Penerbit GPFE: Yogyakarta.
- Rodriguez and Arias. 2012. *Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate?*. The Chinese Economy.
- Sayekti, dan Wandabio. 2007. *Pengaruh CSR Disclosure terhadap Earning Response Coefficient (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)*. Makalah: Makassar.
- Setiani, Citra Janiencia. 2016. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014)*. Skripsi. Universitas Lampung: Lampung.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan: Bandung.
- Shihab, M. Quraish. 2009. *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan Pustaka: Bandung
- Simarmata, W. 2012. *Almanak HKBP 2012*. Medan : HKBP
- Slemrod, Joel dan Yitzhaki, Shlomo. 2002. *Tax Avoidance, Evasion, and Administration*. Dalam A.J. Auerbach dan M. Feldstein (Editor). Handbook of Public Economics.
- Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Amazon: Jakarta.
- Susanto, A.B. 2009. *Reputation Driven Corporate Social Responsibility Pendekatan Startegic Management Dalam CSR*. Erlangga: Jakarta.
- Susilohadi, P. 2008. *Implementasi Corporate Social Responsibility untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. Spirit Publik: Jakarta.
- Sutedi, adrian. 2011 . *Good Corporate Governance* . Sinar Grafika: Jakarta.
- Suyanto, Krisnata Dwi dan Suparmono. 2012. *Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Afresivitas Pajak Perusahaan*. Jurnal Keuangan dan Perbankan.
- Tarjo. 2010. *Analisa Free Cash Flow dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Publik di Indonesia*. Jurnal Riset akuntansi Indonesia.
- Valentinus, Darsono. 2015. *Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak*. Penerbitan Universitas Atma Jaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia, Edisi 7*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Warsono dan Ardianto, Yuli. 2015. *Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak dengan Insentif Pajak sebagai Pemoderasi. (studi pada perusahaan pertambangan di Indonesia)*. Universitas Udayana: Bali.
- Watson, Luke. 2011. *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Examination of Unrecognized Tax Benefits*. American Taxation

- Association Midyear Meeting Paper: New Faculty/Doctoral Student Research Session.
- Watson, Luke. 2014. *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Examination of Unrecognized Tax Benefits*. American Taxation. Association Midyear Meeting Paper: New Faculty/Doctoral Student Research Session.
- Watts, R., Zimmerman, J. 1986. *Towards a Positive Theory of Accounting*. New Jersey: Prentice-Hall
- Wiagustini, Putu. 2010. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Winarsih, Rina. 2014. *Pengaruh CSR dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak*. Universitas Udayana: Bali.
- Winoto dan Indarti, Iin. 2015. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak*. Universitas Negeri Malang: Malang.
- Yoehana Mareta. 2013. *Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak*. Skripsi. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Yusanto, Ismail dan Yunus, Arif. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Al Azhar Press: Bogor.
- Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- <https://prezi.com/fibvrp8sup8a/pandangan-islam-terhadap-tanggung-jawab-sosial-dalam-bisnis/> diakses tanggal 20 Oktober 2017 pk 13.30 WIB.
- [https://www.academia.edu/5488117/Perencanaan dalam Perspektif Islam dan implicasinya dalam Kehidupan?auto=download](https://www.academia.edu/5488117/Perencanaan_dalam_Perspektif_Islam_dan_implicasinya_dalam_Kehidupan?auto=download) diakses tanggal 20 Oktober 2017 pk 13.30 WIB.
- <http://likesahabat.blogspot.co.id/2016/12/perencanaan-dalam-perspektif-islam-dan.html> diakses tanggal 20 Oktober 2017 pk 13.30 WIB.
- <http://kabar24.bisnis.com/read/20170912/19/689292/aksi-penghindaran-pajak-negara-teluk-arab-paling-mendominasi> diakses tanggal 20 Oktober 2017 pk 13.30 WIB.
- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160407144455-134122386/sepuluh-negara-surga-pajak-tempat-harta-disembunyikan/> diakses tanggal 20 Oktober 2017 pk 13.30 WIB.
- <http://www.pajak.go.id/content/penghindaran-pajak-perusahaan-global-di-dunia> diakses tanggal 20 Oktober 2017 pk 13.30 WIB.
- www.kemenperin.go.id
- www.bps.go.id
- www.kompas.com
- www.sahamok.com
- www.idx.co.id
- www.globalreporting.org
- www.bursaefekindonesia.co.id

LAMPIRAN 1
Data ROA, DER, TAX AVOIDANCE, DAN CSR

PERUSAHAAN	ROA	DER	TAX	CSR
AISA 2014	14.03	0.05	0.25	0.75
AISA 2015	12.11	0.03	0.25	0.77
AISA 2016	20.49	0.04	0.24	0.77
ICBP 2014	14.19	0.21	0.18	0.50
ICBP 2015	30.84	0.17	0.19	0.52
ICBP 2016	22.09	0.18	0.19	0.52
INDF 2014	27.79	0.25	0.25	0.51
INDF 2015	16.60	0.21	0.27	0.51
INDF 2016	21.69	0.22	0.28	0.51
MLBI 2014	14.26	0.04	0.27	0.50
MLBI 2015	16.48	0.04	0.31	0.52
MLBI 2016	17.73	0.03	0.24	0.52
MYOR 2014	16.24	0.40	0.16	0.67
MYOR 2015	14.19	0.39	0.17	0.67
MYOR 2016	12.27	0.38	0.15	0.67
ULTJ 2014	20.64	0.28	0.20	0.50
ULTJ 2015	14.10	0.18	0.21	0.52
ULTJ 2016	31.07	0.35	0.24	0.52
GGRM 2014	22.19	0.28	0.40	0.64
GGRM 2015	27.88	0.29	0.47	0.67
GGRM 2016	16.73	0.18	0.29	0.67
HMSP 2014	21.81	0.23	0.25	0.87
HMSP 2015	14.35	0.25	0.26	0.87
HMSP 2016	16.75	0.20	0.25	0.87
RMBA 2014	17.86	0.06	0.20	0.65
RMBA 2015	16.36	0.07	0.37	0.67
RMBA 2016	14.31	0.10	0.28	0.67
KAEF 2014	12.37	0.11	0.22	0.67
KAEF 2015	20.81	0.10	0.24	0.69
KAEF 2016	14.08	0.04	0.22	0.69
KLBF 2014	31.26	0.55	-0.02	0.50
KLBF 2015	22.55	0.57	-0.15	0.52
KLBF 2016	27.87	0.40	0.04	0.52
MERK 2014	16.87	0.13	0.23	0.42
MERK 2015	21.87	0.12	0.26	0.43
MERK 2016	14.37	0.09	0.27	0.43
UNVR 2014	16.91	0.04	0.25	0.46

UNVR 2015	17.91	0.05	0.25	0.48
UNVR 2016	16.47	0.06	0.25	0.48

LAMPIRAN 2
Data ROA

NO	PERUSAHAAN	LABA SETELAH PAJAK	TOTAL AKTIVA	ROA
1	AISA 2014	1.579.855.165,00	1.126.055	14.03
2	AISA 2015	1.501.551.597	1.239.927	12.11
3	AISA 2016	2.973.139.980,00	1.451.020	20.49
4	ICBP 2014	218.978.661	154.319	14.19
5	ICBP 2015	562.133.016,00	182.274	30.84
6	ICBP 2016	472.712.746	213.994	22.09
7	INDF 2014	2.019.201.118.858,00	726.592.702	27.79
8	INDF 2015	1.319.725.660.280	795.015.458	16.60
9	INDF 2016	1.988.091.433.809,00	916.593.561	21.69
10	MLBI 2014	2.250.903.924	1.578.474	14.26
11	MLBI 2015	2.391.813.264,00	1.451.343	16.48
12	MLBI 2016	2.352.338.388	1.326.756	17.73
13	MYOR 2014	29.652.894.377.771.600,00	18.259.171.414.884	16.24
14	MYOR 2015	35.289.530.645.259.000	24.869.295.733.093	14.19
15	MYOR 2016	38.405.544.701.936.400,00	31.300.362.430.266	12.27
16	ULTJ 2014	7.017.965.338.320	3.400.177.005	20.64
17	ULTJ 2015	5.510.508.869.790,00	3.908.162.319	14.10
18	ULTJ 2016	13.416.058.741.566	4.318.010.538	31.07
19	GGRM 2014	2.181.032.841.621.510,00	982.889.969.185	22.19
20	GGRM 2015	3.265.476.247.131.720	1.171.261.207.723	27.88
21	GGRM 2016	2.137.998.460.398.880,00	1.277.942.893.245	16.73
22	HMSP 2014	32.108.461.719	14.721.899	21.81
23	HMSP 2015	23.315.011.825,00	16.247.395	14.35
24	HMSP 2016	30.788.365.950	18.381.114	16.75
25	RMBA 2014	4.384.562.114.140,00	2.454.961.990	17.86
26	RMBA 2015	4.315.219.573.536	2.637.664.776	16.36
27	RMBA 2016	4.221.899.972.226,00	2.950.314.446	14.31
28	KAEF 2014	1.787.805.175	1.445.275	12.37
29	KAEF 2015	3.257.147.904,00	1.565.184	20.81
30	KAEF 2016	2.411.495.680	1.712.710	14.08
31	KLBF 2014	21.507.523.956,00	6.880.206	31.26
32	KLBF 2015	32.285.924.165	14.317.483	22.55
33	KLBF 2016	52.170.441.057,00	18.719.211	27.87

34	MERK 2014	78.344.384.594	46.440.062	16.87
35	MERK 2015	110.007.484.371,00	50.300.633	21.87
36	MERK 2016	82.429.544.628	57.362.244	14.37
37	UNVR 2014	17.725.589.592,00	10.482.312	16.91
38	UNVR 2015	20.308.347.801,00	11.339.111	17.91
39	UNVR 2016	20.922.611.796	12.703.468	16.47

LAMPIRAN 3
Data DER

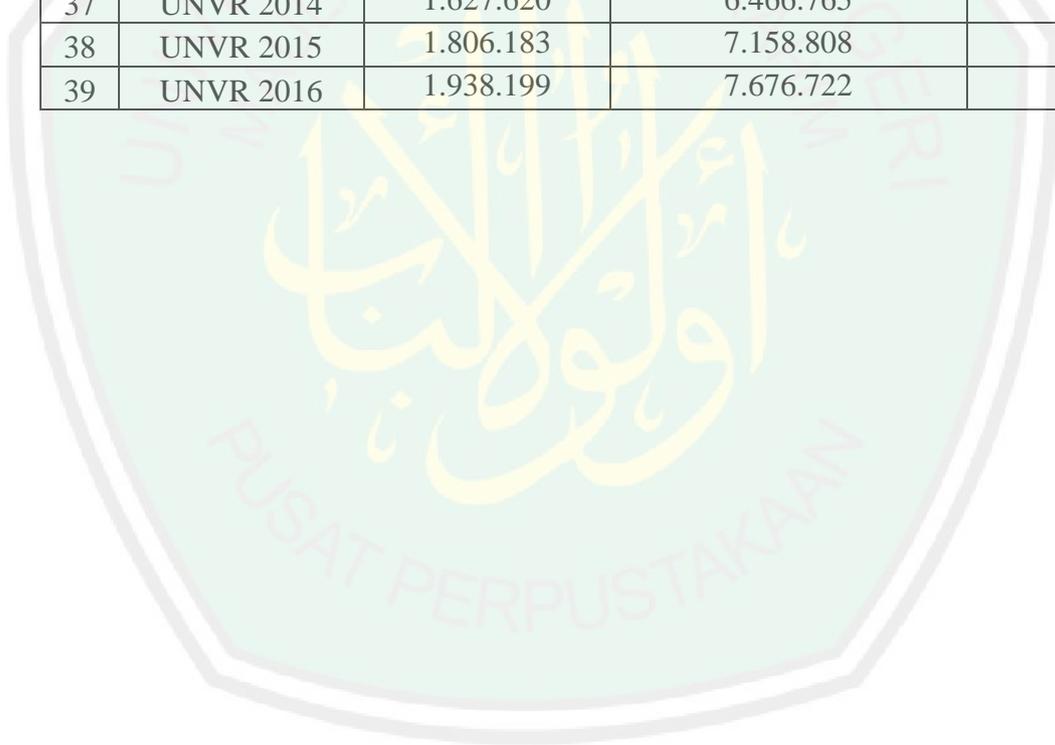
NO	PERUSAHAAN	TOTAL HUTANG	EKUITAS	DER
1	AISA 2014	64.916	1.239.927	0.05
2	AISA 2015	47.958	1.451.020	0.03
3	AISA 2016	59.473	1.633.339	0.04
4	ICBP 2014	38.282	182.274	0.21
5	ICBP 2015	36.667	213.994	0.17
6	ICBP 2016	42.182	236.029	0.18
7	INDF 2014	196.245.555	795.015.458	0.25
8	INDF 2015	192.431.075	916.593.561	0.21
9	INDF 2016	243.691.371	1.085.460.356	0.22
10	MLBI 2014	51.786	1.451.343	0.04
11	MLBI 2015	53.611	1.326.756	0.04
12	MLBI 2016	44.554	1.307.348	0.03
13	MYOR 2014	9.919.981.871.127	24.869.295.733.093	0.40
14	MYOR 2015	12.281.225.413.069	31.300.362.430.266	0.39
15	MYOR 2016	14.389.379.227.138	37.761.220.693.695	0.38
16	ULTJ 2014	1.080.620.917	3.908.162.319	0.28
17	ULTJ 2015	760.734.933	4.318.010.538	0.18
18	ULTJ 2016	2.161.809.828	6.215.496.359	0.35
19	GGRM 2014	333.728.577.922	1.171.261.207.723	0.28
20	GGRM 2015	370.887.017.949	1.277.942.893.245	0.29
21	GGRM 2016	225.286.369.485	1.264.142.659.644	0.18
22	HMSP 2014	3.809.473	16.247.395	0.23
23	HMSP 2015	4.614.664	18.381.114	0.25
24	HMSP 2016	4.349.920	21.292.993	0.20
25	RMBA 2014	165.220.585	2.637.664.776	0.06
26	RMBA 2015	211.673.755	2.950.314.446	0.07
27	RMBA 2016	329.874.877	3.156.290.546	0.10
28	KAEF 2014	165.224	1.565.184	0.11
29	KAEF 2015	171.303	1.712.710	0.10

30	KAEF 2016	65.758	1.749.395	0.04
31	KLBF 2014	7.890.076	14.317.483	0.55
32	KLBF 2015	10.674.250	18.719.211	0.57
33	KLBF 2016	8.778.951	22.034.082	0.40
34	MERK 2014	6.672.912	50.300.633	0.13
35	MERK 2015	7.152.682	57.362.244	0.12
36	MERK 2016	5.417.481	60.292.031	0.09
37	UNVR 2014	480.718	11.339.111	0.04
38	UNVR 2015	674.076	12.703.468	0.05
39	UNVR 2016	817.056	14.280.670	0.06

LAMPIRAN 4
Data Tax Avoidance

NO	PERUSAHAAN	BEBAN PAJAK	PEND. SEBELUM PAJAK	TAX AVOIDANCE
1	AISA 2014	55.698	22.689	0.25
2	AISA 2015	69.382	278.388	0.25
3	AISA 2016	80.442	340.663	0.24
4	ICBP 2014	5.156	27.898	0.18
5	ICBP 2015	5.226	27.523	0.19
6	ICBP 2016	5.227	27.352	0.19
7	INDF 2014	63.127.902	252.556.208	0.25
8	INDF 2015	93.025.646	343.042.742	0.27
9	INDF 2016	104.854.455	374.614.540	0.28
10	MLBI 2014	159.066	591.109	0.27
11	MLBI 2015	90.464	295.445	0.31
12	MLBI 2016	61.812	26.203	0.24
13	MYOR 2014	254.241.267.447	1.577.088.286.385	0.16
14	MYOR 2015	332.339.012.284	1.924.830.226.980	0.17
15	MYOR 2016	559.762.631.282	3.694.978.541.909	0.15
16	ULTJ 2014	233.051.777	1.148.308.027	0.20
17	ULTJ 2015	227.838.102	1.065.739.975	0.21
18	ULTJ 2016	231.093.948	978.765.428	0.24
19	GGRM 2014	19.232.888.518	48.226.597.997	0.40
20	GGRM 2015	26.727.442.868	56.362.930.594	0.47
21	GGRM 2016	22.208.701.966	77.914.196.902	0.29
22	HMSP 2014	730.525	2.882.834	0.25
23	HMSP 2015	311.424	1.204.196	0.26
24	HMSP 2016	487.421	1.962.076	0.25

25	RMBA 2014	11.243.078	57.562.764	0.20
26	RMBA 2015	15.882.120	42.353.329	0.37
27	RMBA 2016	17.379.342	61.418.891	0.28
28	KAEF 2014	82.758	369.688	0.22
29	KAEF 2015	108.442	461.143	0.24
30	KAEF 2016	119.683	54.115	0.22
31	KLBF 2014	-14.167	913.248	-0.02
32	KLBF 2015	-174.148	1.177.376	-0.15
33	KLBF 2016	58.459	1.430.563	0.04
34	MERK 2014	1.693.413	7.446.755	0.23
35	MERK 2015	1.788.559	6.857.337	0.26
36	MERK 2016	1.781.888	6.621.858	0.27
37	UNVR 2014	1.627.620	6.466.765	0.25
38	UNVR 2015	1.806.183	7.158.808	0.25
39	UNVR 2016	1.938.199	7.676.722	0.25



LAMPIRAN 5
Data CSR

INDEKS GRI- G4	TAHUN 2016												
	PERUSAHAAN												
	AISA	ICBP	INDF	MLBI	MYOR	ULTJ	GGRM	HMSP	RMBA	KAEF	KLBF	MERK	UNVR
EC1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
EC2	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
EC3	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
EC4	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
EC5	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0
EC6	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0
EC7	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
EC8	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
EC9	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0
EN1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
EN2	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
EN3	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
EN4	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
EN5	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
EN6	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
EN7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EN8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EN9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EN10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EN11	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0

S04	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1
S05	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1
S06	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
S07	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
S08	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
S09	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
S010	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
S011	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PR1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
PR2	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
PR3	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
PR4	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
PR5	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
PR6	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
PR7	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
PR8	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
PR9	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
JUMLAH	70	47	46	47	61	47	61	79	61	63	47	39	44				
CSRDI	0,76923	0,51648	0,50549	0,51648	0,67033	0,51648	0,67033	0,86813	0,67033	0,69231	0,51648	0,42857	0,48352				
TAHUN 2015																	
PERUSAHAAN																	
INDEKS GRI-G4																	
	AISA	ICBP	INDF	MLBI	MYOR	ULTJ	GGRM	HMSP	RMBA	KAEF	KLBF	MERK	UNVR				
EC1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1				
EC2	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1				
EC3	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1				
EC4	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1				

INDEKS GRI- G4	PERUSAHAAN												
	AISA	ICBP	INDF	MLBI	MYOR	ULTJ	GGRM	HMSP	RMBA	KAEF	KLBF	MERK	UNVR
PR4	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0
PR5	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0
PR6	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0
PR7	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0
PR8	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0
PR9	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0
JUMLAH	70	47	46	47	61	47	61	79	61	63	47	39	44
CSRDI	0,76923	0,51648	0,50549	0,51648	0,67033	0,51648	0,67033	0,86813	0,67033	0,69231	0,51648	0,42857	0,48352
TAHUN 2014													
PERUSAHAAN													
EC1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
EC2	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0
EC3	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
EC4	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
EC5	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0
EC6	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0
EC7	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
EC8	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0
EC9	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
EN1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
EN2	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
EN3	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
EN4	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
EN5	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
EN6	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1

HR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S03	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S04	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S05	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S06	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S07	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S08	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S09	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S010	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S011	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PR1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PR2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PR3	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PR4	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PR5	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PR6	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PR7	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PR8	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PR9	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JUMLAH	68	45	46	45	61	45	58	79	59	61	45	38	42							
CSRDI	0,74725	0,49451	0,50549	0,49451	0,67033	0,49451	0,63736	0,86813	0,64835	0,67033	0,49451	0,41758	0,46154							

LAMPIRAN 6
Hasil Perhitungan PLS

Outer Loading/ Loading Factor

Outer Loading

	CSR	DER	MODERATING EFFECT 1	MODERATING EFFECT 2	ROA	TAX
CSR	1.000					
DER		1.000				
DER*CSR				1.000		
ROA					1.000	
ROA*CSR			1.000			
TAX						1.000

Realibilitas dan Validitas Konstruk

Validitas dan Reliabilitas Konstruk (Uji validitas diskriminan dengan AVE)

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
Efek Moderasi 1	1.000	1.000	1.000	1.000
Efek Moderasi 2	1.000	1.000	1.000	1.000
ROA	1.000	1.000	1.000	1.000
CSR	1.000	1.000	1.000	1.000
DER	1.000	1.000	1.000	1.000
TAX	1.000	1.000	1.000	1.000

R Square

R Square

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Error (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	P Values
TAX	0.574	0.613	0.146	3.935	0.000

Koefisien Jalur

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standar Deviasi (STDEV)</i>	<i>T Statistik (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
ROA -> TAX	0.343	0.343	0.173	1.980	0.048
DER -> TAX	-0.603	-0.567	0.165	3.653	0.000
CSR -> TAX	0.355	0.362	0.146	2.440	0.015
MODERATING EFFECT 1 -> TAX	0.178	0.217	0.223	0.799	0.424
MODERATING EFFECT 2 -> TAX	0.478	0.437	0.163	2.942	0.003



LAMPIRAN 7
Indikator Pengungkapan CSR Berdasarkan GRI-G4

KATEGORI EKONOMI		
-Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan.
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim.
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas imbalan pasti.
	EC4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah.
-Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (<i>entry level</i>) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan.
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di operasi yang signifikan.
-Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan.
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak.
-Praktek Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pemasok lokal di operasional yang signifikan.
KATEGORI LINGKUNGAN		
-Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat dan volume.
	EN2	Presentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang.
-Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi.
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi.
	EN5	Intensitas energi
	EN6	Pengurangan konsumsi energi.
-Air	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi.
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber.
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air.
	EN10	Presentase dan total volum air yang didaur ulang dan digunakan kembali.
-Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung.
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi dikawasan lindung.

	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan.
	EN14	Jumlah total spesies dalam <i>iucn red list</i> dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
-Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 1)
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2).
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3).
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK).
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO).
	EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya.
-Efluen dan Limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan.
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan.
	EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan.
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel2 Lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional.
	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi.
-Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa.
	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori.
-Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan.
-Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja.
-Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis.
-Asesmen Pemasok Atas Lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan.
	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang

		diambil.
-Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.
KATEGORI SOSIAL		
SUB-KATEGORI: PRAKTEK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA		
-Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah.
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan.
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender.
-Hubungan Industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama.
-Kesehatan dan Keselamatan Kerja VV	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja.
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender.
	LA7	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka.
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja.
-Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan.
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberkelanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti.
	LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan.
-Keberagaman dan Kesetaraan Peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya.
-Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan.

-Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan.
	LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui pengaduan resmi
SUB-KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA		
-Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia.
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan Aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih.
-Non-Diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil.
-Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
-Pekerja Anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif.
-Pekerja Paksa Atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja.
-Praktik Pengamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi.
-Hak Adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
-Asesmen	HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan reviu atau asesmen dampak hak asasi manusia.
-Asesmen Pemasok Atas Hak Asasi Manusia	HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia.
	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.

-Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal.
SUB-KATEGORI: MASYARAKAT		
-Masyarakat Lokal	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan.
	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal.
-Anti Korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi.
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi.
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.
-Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat.
-Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya.
-Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan.
-Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat.
	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
-Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.
SUB-KATEGORI: TANGGUNGJAWAB ATAS PRODUK		
-Kesehatan Keselamatan Pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan.
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil.
-Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis.

	PR4	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil.
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan.
-Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan.
	PR7	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil.
-Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan.
-Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa.

Sumber: www.globalreporting.org.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 4828/BAN-PT/Akred/S/XII/2017
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang 65144, Telepon: (0341) 558881, Faksimile: (0341) 558881

Nomor :/F.EK/PP.00.9/02/2018
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Malang, 26 Maret 2018

SURAT KETERANGAN

Pengelola Galeri Investasi BEI-UIN, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menerangkan bahwa tersebut di bawah ini :

Nama : Nur Amalia Sari
NIP : 14510057
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/S1 Manajemen
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Penelitian : Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Dengan CSR Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016)

Mahasiswi tersebut telah melaksanakan penelitian di Galeri Investasi BEI-UIN, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.
Ketua GI BEI-UIN,



Muh. Nanang Choiruddin SE., MM.
NIDT. 19850820201608011047



BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Amalia Sari

NIM/Jurusan : 14510057/Manajemen

Pembimbing : Hj. Mardiana, SE., MM.

Judul Skripsi : Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak dengan CSR sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2016)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	7 Oktober 2017	Pengajuan Outline	1.
2	11 Oktober 2017	Proposal	2.
3	18 Oktober 2017	Revisi Bab I, II, III	3.
4	27 Oktober 2017	Revisi Bab I, II, III	4.
5	6 November 2017	Revisi Bab I, II, III	5.
6	7 November 2017	Acc Proposal	6.
7	22 November 2017	Seminar Proposal	7.
8	14 Februari 2018	Revisi Bab IV dan V	8.
9	15 Februari 2018	Revisi Bab IV dan V	9.
10	21 Februari 2018	Revisi Bab IV dan V	10.
11	22 Februari 2018	Acc Keseluruhan	11.

Malang, 22 Februari 2018

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen,


Drs. Agus Sucipto, MM.¹
NIP. 196708162003121001

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Nur Amalia Sari

Tempat, tanggal lahir : Kediri, 31 Januari 1996

Alamat Asal : Jalan Airlangga No. 129 Katang Kab. Kediri

Alamat Kos : Jl. Joyosuko Metro 41P, Lowokwaru, Malang

Telepon/Hp : 0822 3466 8722

E-mail : Lyamaliasari@gmail.com

Pendidikan Formal

2000-2002 : TK Perwanida Kediri

2002-2008 : SDN Burengan 2 Kediri

2008-2011 : SMPN 3 Kediri

2011-2014 : SMAN 1 Kediri

2014-2018 : Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2014-2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki Malang

2015 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang

Pengalaman Organisasi

➤ Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Rayon Ekonomi
Muhammad Hatta tahun 2014

➤ Anggota Halaqoh Ilmiah Pusat Ma'had Al-Jami'ah tahun 2014

➤ Anggota Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang tahun 2016

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta *Future Management Training* Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang Tahun 2014
- Peserta *Remarkable Young Generation* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014
- Peserta Seminar “*SPEAK UP YOUR MIND*” Mabna Asma’ Binti Abi Bakar UIN Maliki Malang Tahun 2014
- Peserta Seminar “Pasar Modal dan Saham” UM Malang Tahun 2014
- Peserta Seminar Azzam Islamic Research (AIR) dan Unit Integrasi Sains Islam SAINTEK UIN Malang tahun 2014
- Peserta Seminar Nasional BIOMA di UIN Malang tahun 2015
- Pengajar Sekolah Untuk Anak Jalanan di Save Street Children Malang Tahun 2015
- Peserta Pendidikan Dasar Koperasi X UIN Maliki Malang Tahun 2016
- Peserta Seminar “Menulislah Maka Kau Akan Hidup Selamanya” 2016
- Peserta Pelatihan SPSS di Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang Tahun 2017